

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Gatot Subroto III – 5 Purwokerto
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	5
1.3.3 Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	7
2.1.1 Struktur Organisasi.....	7
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2 SUMBER DAYA SKPD	11
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD	12
2.4 HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING	17
2.5 KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD	17
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1.1 KONDISI UMUM DAERAH.....	18
3.1.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN.....	27
3.2 TELAHAH RENSTRA K/L / PROPINSI	28
3.2.1 Renstra Kementerian PUPR.....	28
3.2.2 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang).....	43
3.2.3 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya).....	44
3.3 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	46
3.3.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas.....	46
3.3.2 Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang.....	63
3.3.3 Pola Ruang Kabupaten Banyumas.....	66
3.3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten.....	81
3.3.5 Wilayah Rawan Bencana.....	83
3.3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	85
3.4 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :	87
3.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	87

3.4.2 Isu Strategis	90
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	109
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum	109
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum	109
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	112
5.1 Strategi	112
5.2 Arah Kebijakan	113
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	115
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	145
VIII. PENUTUP	146
IX. LAMPIRAN.....	147

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disekeliling daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berkewajiban untuk menyiapkan Renstra yang dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas adalah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi

kegiatan pembangunan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas maka perlu dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah sub bidang sumber daya air dan sub bidang bina marga pada urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mendasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2025;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan :

- a) Memberikan gambaran arah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Infrastruktur daerah bidang Pekerjaan Umum selama kurun waktu tahun lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

- b) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada setiap tahun anggaran;
- c) Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
- d) Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b) Acuan penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c) Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

1.3.3 Hubungan Renstra Skpd Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan penyusunan awal renstra dengan selalu mengikuti proses-proses musyawarah rencana pembangunan sampai pada tingkat penetapan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Renstra selanjutnya menjadi acuan dan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, sehingga dokumen perencanaan berkesinambungan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan Dinas PU Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PU, telaahan Renstra Kementerian PUPR, telaahan Renstra Dinas PU SDATARU dan Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinas PU Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Bappedalitbang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas PU Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Bab IX Lampiran

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

2.1.1 Struktur Organisasi

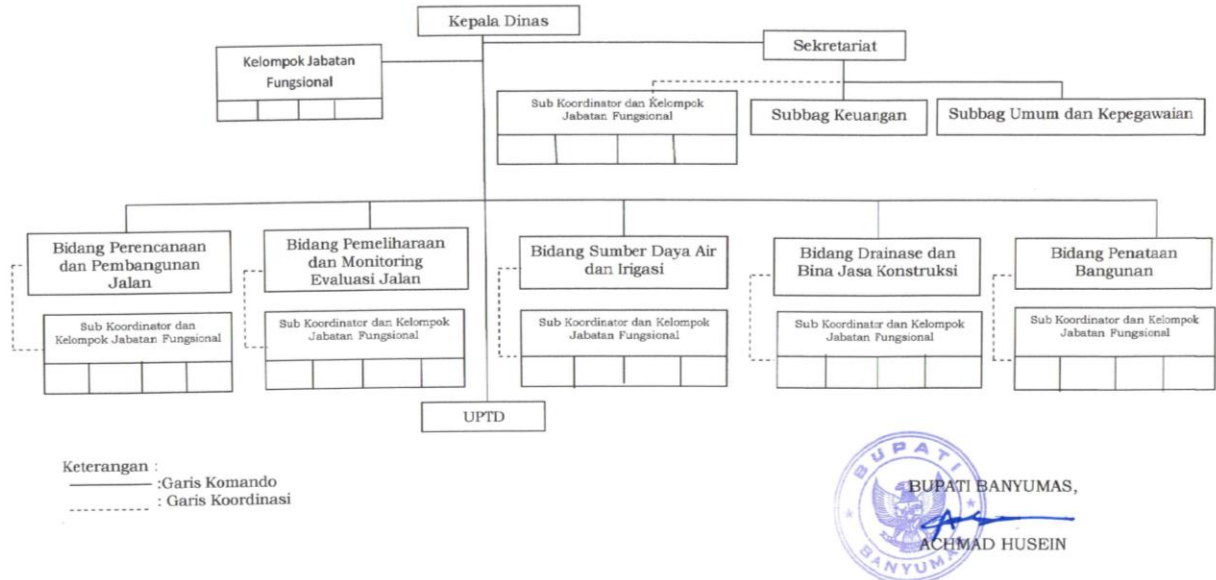
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dan 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. sekretariat, terdiri dari :
 - a. sub bagian keuangan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - c. sub koordinator perencanaan;
3. bidang perencanaan dan pembangunan jalan, terdiri dari :
 - a. sub koordinator perencanaan jalan;
 - b. sub koordinator pembangunan jalan;
4. bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pemeliharaan jalan;
 - b. sub koordinator monitoring evaluasi jalan;
5. bidang sumber daya air dan irigasi, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pembangunan sumber daya air;
 - b. sub koordinator pembangunan irigasi;
 - c. sub koordinator operasi pemeliharaan sumber daya air dan irigasi;
6. f.bidang drainase dan bina jasa konstruksi, terdiri dari:
 - a. sub koordinator drainase;
 - b. sub koordinator pembinaan jasa konstruksi;
7. g. bidang penataan bangunan, terdiri dari:
 - a. sub koordinator pengelolaan bangunan gedung;
 - b. sub koordinator penataan bangunan gedung dan lingkungan;
 - c. sub koordinator pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
8. UPTD;
9. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perbup Kabupaten Banyumas nomor 100 tahun 2021.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 100 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Jalan, dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan jalan, bidang pemeliharaan dan monitoring evaluasi jalan, bidang sumber daya air dan irigasi, bidang drainase dan bina jasa konstruksi, bidang penataan bangunan;

4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di DPU.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
3. penyiapan bahan pembinaan dan monitoring serta pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
4. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan

Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan

Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

6. Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Drainase dan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Bidang Penataan Bangunan

Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.

9. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Jumlah Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir bulan Maret tahun 2023 adalah sejumlah 150 orang. Data kepegawaian dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dapat di jabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DPU Berdasarkan Golongan
di Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	12		12
2	Golongan II	45	5	50
3	Golongan III	61	20	81
4	Golongan IV	4	3	7
		122	28	150

1. Jumlah Pejabat Struktural

- a. Eselon II B : 1 Orang
- b. Eselon III A : 1 Orang
- c. Eselon III B : 5 Orang
- d. Eselon IV A :10 Orang
- e. Eselon IV B : 8 Orang

JUMLAH :25 Orang

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

- a. Jumlah PNS Golongan IV : 7 Orang
- b. Jumlah PNS Golongan III :81 Orang
- c. Jumlah PNS Golongan II :50 Orang
- d. Jumlah PNS Golongan I :12 Orang
- e. Jumlah CPNS : - Orang

JUMLAH :150Orang

3. Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan

- a. Pendidikan Setingkat S3 : 0 Orang
- b. Pendidikan Setingkat S2 : 7 Orang
- c. Pendidikan Setingkat S1 :63 Orang
- d. Pendidikan Setingkat D3 : 8 Orang
- e. Pendidikan Setingkat SLTA :51 Orang
- f. Pendidikan Setingkat SLTP : 9 Orang
- g. Pendidikan Setingkat SD :12 Orang

JUMLAH :150Orang

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan partisipatif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah; dan Bawah-Atas. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (up-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Perencanaan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : Penyusunan rencana; Penetapan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana, dan Evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui :

- a. Perencanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur Daerah;
- c. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang Pelayanan Umum khususnya bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum;
3. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan OPD terkait;
6. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Sumber Daya Air, irigasi, Drainase, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Jasa Konstruksi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan umum, tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum dengan indikator dan capaian yang diperbarui.

Indikator kinerja pada tahun 2024-2026, sebagian besar menggunakan indikator baru dan ada indikator lama namun dilakukan perubahan pada rumus perhitungannya mengikuti rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yaitu dari sebesar 35,473% menjadi 57,596%.

Selanjutnya kinerja sub urusan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 76,74% pada tahun 2018 dan tahun 2022 menjadi sebesar 81,21%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 664,440 km.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum dan irigasi Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumber daya air berupa mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan/air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneng. Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 17 buah embung, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering.

Perkembangan kondisi jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2022

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Kabupaten	1.508 Km	1.508 Km	1.508 Km	1.508 Km	1.508 Km
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,473%	37,867%	47,514%	51,109%	57,596%
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	23,526%	25,831%	28,762%	28,657%	23,653%
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	41,002%	36,303%	23,724%	20,234%	18,751%
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	641.081	641.081	641.081	654.648	664.440
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	76,74%	78,31%	78,62%	80,44%	81,21%
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	23,26%	21,69%	21,38%	19,56%	18,79%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2023

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, peningkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantaban kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPU
Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun ke-	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum			72,77	76,21	73,42	75,21	100,89	98,69
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik			80,35	81,10	80,35	80,35	100,00	99,08
3	Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan			51,78	53	51,90	52,31	100,23	98,70
4	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik			70,56	71,89	71,78	74,77	101,73	104,01
5	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina			65,09	76,35	59,46	68,81	91,35	90,12
6	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik			69,70	72,7	68,27	68,27	97,95	93,91
7	Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik			92,45	93,05	96,37	97,89	104,24	105,20

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPU
Kabupaten Banyumas

Bidang	Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke – (x1.000.000)					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rata-Rata Pertum- buhan Anggaran	Rata-Rata Pertum- buhan Realisasi Anggaran
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
Sekretariat	6.151,250	4.894,250	6.942,924	20.527,366	22.689,580	5.182,722	3.270,206	6.359,036	19.538,886	21.474,254	84,25	66,82	91,59	95,18	94,64	29,83%	32,88%
Perencanaan dan Pembangunan Jalan	214.710,155	207.554,458	130.834,097	68.562,012	100.677,139	206.887,914	192.373,738	129.036,671	56.919,223	90.818,902	96,36	92,69	98,63	83,02	90,21	-14,06%	-15,18%
Pemeliharaan dan Monev Jalan	29.186,645	15.239,719	8.958,000	15.899,724	30.227,260	25.081,189	12.983,880	8.408,578	14.763,928	29.764,184	85,93	85,20	93,87	92,86	98,47	0,70%	3,48%
SDA dan Irigasi	22.421,731	22.079,770	31.368,554	33.815,191	28.048,290	21.121,341	17.277,893	25.296,224	28.165,310	22.576,719	94,20	78,25	80,64	83,29	80,49	4,58%	1,34%
Tata Bangunan	35.556,644	36.730,092	12.164,268	163.140,610	151.306,090	32.334,562	32.385,133	11.972,071	61.783,350	146.002,173	90,94	88,17	98,42	37,87	96,49	33,59%	35,19%
Pembinaan Teknis & Jasa Konstuksi	1.457,750	1.218,500	2.873,838	-	-	1.240,667	373,542	2.798,322	-	-	85,11	30,66	97,37			14,54%	17,67%
Drainase dan Jasa Konstruksi	-	-	-	2.813,858	3.526,000	-	-	-	2.738,160	3.518,127				97,31	99,78	4,62%	5,14%
	309.484,175	287.716,790	193.141,682	304.758,760	336.474,358	291.848,393	258.664,392	183.870,903	181.170,696	310.636,232	94,30	89,90	95,20	59,45	92,32	1,69%	1,26%

2.4 HAL LAIN YANG DIANGGAP PENTING

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas adalah :

1. Koordinasi dengan instansi lain baik koordinasi vertikal maupun horisontal;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan baik sebelum ataupun sesudah;
3. Inventarisasi / Pendataan seluruh kegiatan;

2.5 KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Namun demikian dapat juga dicari alternatif-alternatif dalam menghadapi permasalahan.

a. Kekuatan (internal)

- 1) Tupoksi Dinas jelas;
- 2) Program Dinas merupakan salah satu misi bupati;
- 3) SDM dinas memiliki komitmen yang tinggi;
- 4) Kemajuan IPTEK, pendukung pengelolaan Infrastruktur;

b. Kelemahan (internal)

- 1) Terbatasnya kapasitas SDM;
- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
- 3) Terbatasnya sistem database;
- 4) Belum optimalnya sistem manajemen Kelembagaan;

c. Tantangan (eksternal)

- 1) Kebutuhan anggaran yang besar;
- 2) Kondisi geografis Kab. Banyumas yang mayoritas dataran tinggi (Rawan bencana);
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat;
- 4) Koordinasi antara pemangku kepentingan masih rendah.

d. Peluang (eksternal)

- 1) Tingginya tuntutan masyarakat terhadap Infrastruktur;
- 2) Dukungan pemerintah daerah terhadap prioritas daerah;
- 3) Potensi Infrastruktur yang besar;
- 4) Ketersediaan dana bantuan keuangan dari Pemerintah;

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat dan tidak hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 KONDISI UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108°39'17"BT – 109°27'15"BT dan di antara 7°15'05"LS – 7°37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

Luas Wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau 4,8% dari luas provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 27 wilayah kecamatan dan terbagi lagi menjadi 301 desa dan 30 kelurahan.

Secara Geografis Kabupaten Banyumas terletak pada koordinat 108°39'17" hingga 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" hingga 7°37'10" Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah kabupaten Banyumas berada pada kisaran ketinggian wilayah 25 – 100 m dpl yaitu seluas 42.310,30 Ha dan pada ketinggian 100–500 m dpl seluas 40.310,30 Ha.

Kondisi kabupaten Banyumas yang banyak pegunungan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur Jalan, SDA, irigasi maupun Bangunan Gedung.

B. Sumber Daya Alam

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.a

Luas Wilayah Kab. Banyumas Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2013-2017

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026

No	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2013-2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2017 Diolah

Potensi sumber daya air cukup besar dimana wilayah Kabupaten Banyumas mengalir 176 sungai dasar, total panjang sungai 85.595 km dan beberapa sumber air seperti mata air, embung, dan sebagainya.

Pemanfaatan sumber-sumber air tersebut diantaranya untuk :

- Sistem Irigasi untuk mengairi sawah seluas 32.219 ha yang terdiri dari sawah beririgasi teknis (10.650 Ha), irigasi ½ teknis (4.827), irigasi sederhana Pemerintah (5.933), irigasi sederhana Desa(4.761) dan irigasi desa tadah hujan (6.048);
- Perikanan darat;
- Air baku untuk minum dan kebutuhan sehari-hari;
- Pengendalian banjir;
- Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);

C. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Tabel 3.1.c

Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. <i>Kawasan pertanian lahan basah</i> kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.
	b. <i>Kawasan pertanian lahan kering</i> seluas kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
5	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
7	Kawasan Pertambangan Mineral	
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumbir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
8	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
9	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Pekuncen, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Lumbir, Wangon, Purwojati, Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
10	Kawasan peruntukan industry	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
11	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto – Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto – Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas.

D. Aspek Daya Saing Daerah

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sebesar 87,74% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 1.718,73 km. Jalan kewenangan Nasional sebesar 9,95% dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 2,31%.

Tabel 3.1.d
Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya
di Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Kewenangan	Panjang Jalan	
	km	%
Nasional	171,000	9,95
Provinsi	39,730	2,31
Kabupaten	1.508,000	87,74
Jumlah	1.718,730	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2022

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2022 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan kabupaten. Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwoserto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Tabel 3.1.e
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas
Tahun 2022

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
	Baik		Rusak		
	m	%	m	%	m
Primer	304.490	77,47%	88.564	73,07%	393.054
Sekunder	235.076	86,62%	36.311	26,93%	271.386
Jumlah	539.566	81,21%	124.875	18,79%	664.440

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2022

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 664.440 m dengan rincian

kondisi baik sebanyak 539.566 m dan kondisi jaringan irigasi rusak sebanyak 124.875 m.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Kabupaten Banyumas memiliki 573 daerah irigasi meliputi luas areal 23.716 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas. Pembangunan infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2022 telah meningkatkan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 81,21%.

E. **Wilayah Rawan Bencana**

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. **Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor**

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa.

b. **Wilayah Rawan Bencana Banjir**

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

c. **Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung**

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

d. **Wilayah Rawan Bencana Gunung Api**

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kotaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.

F. Permasalahan Yang Dihadapi

a. Permasalahan Pembangunan Daerah (RPD)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

- Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
- Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten

b. Permasalahan Bidang Ke-PUan

- Keterbatasan anggaran, menyebabkan realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat perencanaan infrastruktur.
- Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain
- Kondisi geografis Kabupaten Banyumas sebagian besar berbukit dengan lereng terjal di Utara dan Barat yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor;
- Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai;

c. Permasalahan Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan :

- Tingginya lalu lintas angkutan barang di jalan Kabupaten dan desa, dengan berat muatan barang melebihi kapasitas jalan;
 - Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah strandar jalan kolektor;
 - Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah strandar jalan kolektor
 - Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;
- d. Permasalahan Bidang SDA dan Irigasi :
- Menurunnya potensi air akibat kerusakan lingkungan dan Bencana Alam;
 - Tingginya angka kerusakan infrastruktur jaringan sungai dan drainase;
 - Minimnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya air.
 - Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit
 - Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai
 - Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas
 - Menurunnya status areal sawah yang semula dapat terairi dari jaringan irigasi, menjadi sawah tadah hujan akibat menurunnya daya dukung sumber daya air dan lahan serta kerusakan jaringan irigasi;
 - Perubahan pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk pertanian lahan sawah namun juga untuk perikanan, peternakan, kebutuhan domestik dll;
 - Kerusakan jaringan irigasi bertambah, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial dan penanganan operasi dan pemeliharaan (O&P) masih terbatas belum memenuhi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP);
 - Menurunnya jumlah tenaga O&P jaringan irigasi;
 - Belum optimalnya peran serta masyarakat (petani/P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- e. Permasalahan Bidang Penataan bangunan :
- Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang, sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.
 - Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya.
- f. Permasalahan Bidang Drainase dan Pembinaan Jasa Konstruksi :
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah

- Masih terdapat kesenjangan kuantitas maupun kualitas infrastruktur daerah antar wilayah di Kabupaten Banyumas

3.1.2 KONDISI YANG DIHARAPKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

Adapun kondisi yang diharapkan :

- a. Terlaksananya pengembangan pengelolaan dan konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya;
- b. Terwujudnya pengelolaan Air Baku, serta tercukupinya kebutuhan air baku bagi masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- c. Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- d. Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan guna mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- e. Tersedianya Perencanaan yang matang serta Sarana dan Prasarana kebinamargaan guna mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap, aman, lancar, efisien dan efektif;
- f. Terwujudnya wilayah bebas bencana serta kesiapan terhadap bencana;
- g. Terlaksananya pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang merata;
- h. Terlaksananya peningkatan SDM, sarana prasarana aparatur serta sistem administrasi perkantoran yang baik untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L / PROPINSI

3.2.1 Renstra Kementerian PUPR

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan dan Strategi

1) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (DSS, forecasting, early warning) dengan memanfaatkan teknologi baru (satelit, radar, real-time system, water accounting systems)

b. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha.

Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

c. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan

SPAM;

- d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

4) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara

proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

5) Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Fokus utama yang akan menjadi kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

- a. Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan: (1) Penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020 – 2024; (2) Penyusunan Database untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database Online Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya. (4) Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.
- b. Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman

pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Perkotaan yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk Major Project 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektoral (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan database wilayah.

- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
- (1) Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW;
 - (2) Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional;
 - (3) Pemrograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantuan dan evaluasi pemrograman internal BPIW;
 - (4) Perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024 dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta;
 - (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit;
 - (6) Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

- 6) Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur
Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan

teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui: sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; (3) Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024; (4) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui bundling infrastruktur; (6) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai bridging finance KPBU bidang PUPR dan vehicle dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI; (7) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited; (8) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek unsolicited dari badan usaha pemrakarsa; (9) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi dokumen permohonan PDF (DPP); (10) Refocusing kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang PU dan Perumahan; (11) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya

ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur; (12) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum; (13) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi demand dan supply; (14) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERAs; (17) Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung major project perumahan publik.

7) Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten.
- b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.
- e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi.

8) Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan dan strategi pengembangan SDM Aparatur meliputi:

- a. Akselerasi pengembangan talent pool untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang i-ProVe

- b. Pengembangan kompetensi ASN
 - c. Akselerasi pengembangan kompetensi ASN
 - d. Pengembangan vocational school
 - e. Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif
 - f. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah
 - g. Penguatan kelembagaan
- 9) Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan
- Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan roadmap RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.
- 10) Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan
- Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; (4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

b. Program

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (2) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (3) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (4) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; (6) Layanan Teknis SDA; (7) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (9) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (10) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).
2. Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan: (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.
5. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15)

Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; (26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kementerian PUPR tahun 2020-2025 adalah :

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC	
			2020	2021	2022	2023	2024			
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.								
(1)		Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	79		
(2)		Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	100	DJSDA	
(3)		Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5		
		(4)	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	22.680	
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.								
		Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2.21	2.19	2.09	2.08	1.90	1.90	DJBM	
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat									

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	98,57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	DJP dan DJPI
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional								
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8	6,8	DJBK
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	90	BPSDM
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44	Setjen dan Dukman Seluruh Unor
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	85	88	88	Itjen
		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	76	BPSDM
		Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	60	65	70	75	80	80	BPIW

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	43	51	57	63	68	68	DJBK

d. Hasil Telaah

Hasil Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3a

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).	Angka kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan masih tinggi;	Laju kerusakan infrastruktur jalan lebih tinggi, terutama pada jalan yang menuju pusat perekonomian dikarenakan angka mobilitas distribusi ekonomi yang tinggi	Tingginya dukungan masyarakat (tuntutan) masyarakat dalam penanganan infrastruktur jalan, menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan Daerah
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Angka kerusakan Aset Gedung Pemerintah masih tinggi;	Kurangnya perhatian dalam pemeliharaan bangunan pemerintah oleh pengguna;	Sedang dalam proses pembaharuan data gedung pemerintah, sehingga mempermudah penyusunan rencana rehabilitasi / pemeliharaan bangunan pemerintah.
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi masih belum dianggap sebagai program prioritas	Pihak penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka dan mau menerima berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Keterbatasan SDM dari sisi jumlah maupun kualifikasi teknis dan lambatnya adaptasi terhadap kemajuan IPTEK	Keterbatasan daerah dalam mengakomodir pelatihan guna meningkatkan kompetensi pegawai, terutama di Bidang Teknis	Komitmen SDM di Dinas PU dalam upaya pengembangan kompetensi

3.2.2 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU SDA dan Tata Ruang)

- a. Tujuan
Belum ada dokumen
- b. Sasaran
Belum ada dokumen
- c. Hasil Telaah

Tabel 3.3b

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Belum ada dokumen	Angka kerusakan SDA dan jaringan irigasi masih tinggi;	Kerusakan SDA / Irigasi meningkat, dikarenakan jaringan irigasi sebagian besar berumur tua sedangkan perbaikan/ rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial;	Potensi Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi
2	Belum ada dokumen	Jumlah bangunan penyedia air baku masih relatif sedikit	Pengadaan tanah untuk pembuatan embung masih relatif sulit, terlebih dengan keterbatasan anggaran	Wilayah pengusul bangunan penyedia air baku, bersedia memberikan dukungan.
3	Belum ada dokumen	Sungai bukan kewenangan Pemerintah kabupaten, sehingga Pemerintah kabupaten tidak menangani pengelolaan Sungai	Untuk dapat menangani permasalahan di sungai, maka diharuskan dibuat KSO dengan pemilik kewenangan sungai	Adanya kemudahan dan fasilitasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam pembuatan KSO.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Belum ada dokumen	Masih terdapat daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Kab. Banyumas	Penanganan genangan memerlukan upaya-upaya multi sektor	Wilayah yang tergenang banjir terlokalisir pada wilayah tertentu, sehingga mempermudah dalam penanganan masalah
5	Belum ada dokumen	Peran DPU dalam penerbitan IMB, masih sebatas rekomendasi teknis, sedangkan penerbitannya dilakukan oleh OPD lain	Jumlah SDM dalam pemantauan pembangunan Bangunan masih kurang. Sedangkan pemahaman masyarakat terkait perijinan masih kurang.	Optimasi peran UPTD DPU maupun Pemerintah kecamatan / Desa / Kelurahan dalam pemantauan IMB.

3.2.3 Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya)

- a. Isu Strategis
Belum ada dokumen
- b. Tujuan
Belum ada dokumen
- c. Sasaran
Belum ada dokumen

d. Hasil Telaah

Tabel 3.3c

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Belum ada dokumen	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik masih rendah;	Setengah dari panjang jalan kabupaten yang ada merupakan perubahan status dari jalan Desa kondisi rusak.	Infrastruktur jalan merupakan janji politik Bupati terpilih sehingga menjadi prioritas dalam dokumen RPJMD
2	Belum ada dokumen	Sebagian besar jalan Kabupaten, struktur konstruksinya masih dibawah strandar jalan kolektor;	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Infrastruktur jalan merupakan pendukung pembangunan multi sektor, sehingga dukungan anggaran infrastruktur jalan relatif tinggi.
3	Belum ada dokumen	Sebagian besar jalan Kabupaten, lebarnya masih dibawah strandar jalan kolektor	Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa.	Kebutuhan masyarakat terhadap jalan menjadikan pemilik lahan lebih kooperatif dalam upaya pelebaran jalan.
4	Belum ada dokumen	Sarana prasarana kebinamargaan, kualitas data, perencanaan dan pengawasan masih belum memadai	Pengadaan / Pemeliharaan Sarana prasarana kebinamargaan memerlukan anggaran yang tinggi, sehingga kalah dalam prioritas penganggaran	Sedang dalam pembahasan terkait optimalisasi peran UPTD dalam pemeliharaan Jalan
5	Belum ada dokumen	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas konstruksi dalam mendukung pembangunan Infrastruktur Daerah	Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting, sehingga anggaran untuk pembinaan Jasa konstruksi masih relatif sangat kecil.	Penyedia jasa konstruksi di Kab. Banyumas sangat terbuka terhadap berbagai arahan / pembinaan dari Pemerintah Daerah (DPU)

3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.3.1 Struktur Ruang Kabupaten Banyumas

A. Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Kegiatan-kegiatan utama dan aksesibilitas regional pada kawasan potensial yang secara spasial dan fungsional berperan membentuk sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Banyumas, adalah :

- a. Kegiatan pertanian tanaman pangan di kawasan pertanian potensial Kabupaten Banyumas;
- b. Kegiatan administrasi pemerintahan, ekonomi regional, pendidikan, kesehatan di Perkotaan Purwokerto;
- c. Pariwisata alam dan buatan lebih terkonsentrasi di kawasan lereng Gunung Slamet yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Sumbang, dan Cilongok;
- d. Jalur transportasi nasional yaitu jalur Jakarta/Jawa Barat – Cilacap –Yogyakarta dan Jakarta/Jawa Barat – Tegal – Cilacap – Yogyakarta; dan
- e. Kegiatan industri yang akan memberikan pengaruh bagi wilayah *hinterlandnya*, seperti perkembangan permukiman, perdagangan dan kegiatan lainnya.

1. Sistem Perkotaan

A. Pusat Kegiatan

Struktur ruang Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam tiga sistem perkotaan-perkotaan yang saling berkaitan dalam satu sistem pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas, meliputi sistem perkotaan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Adapun hirarki sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi di wilayah kabupaten terdiri atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu PKW II/C/I di Perkotaan Purwokerto sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRWP Provinsi Jawa Tengah. Secara fungsional, PKW Perkotaan Purwokerto, meliputi:

- a) Kecamatan Purwokerto Utara;
- b) Kecamatan Purwokerto Timur;
- c) Kecamatan Purwokerto Selatan;
- d) Kecamatan Purwokerto Barat;
- e) sebagian Kecamatan Sumbang;
- f) sebagian Kecamatan Baturraden;

- g) sebagian Kecamatan Kedungbanteng;
- h) sebagian Kecamatan Kembaran;
- i) sebagian Kecamatan Karanglewas;
- j) sebagian Kecamatan Sokaraja; dan
- k) sebagian Kecamatan Patikraja.

Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PKW II/C/I) merupakan kota utama di wilayah Kabupaten Banyumas dan dalam kerangka sistem perkotaan regional dan nasional merupakan salah satu pengembangan kota pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan melalui pengembangan dan peningkatan fungsi.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Perkotaan yang akan dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi :

- a) perkotaan Banyumas;
- b) perkotaan Ajibarang;
- c) perkotaan Sokaraja; dan
- d) perkotaan Wangon.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a) perkotaan Jatilawang;
- b) perkotaan Sumpiuh;
- c) perkotaan Patikraja;
- d) perkotaan Baturaden;
- e) perkotaan Cilongok;
- f) perkotaan Lumbir;
- g) perkotaan Gumelar;
- h) perkotaan Pekuncen;
- i) perkotaan Purwojati;
- j) perkotaan Rawalo;
- k) perkotaan Kemranjen;
- l) perkotaan Tambak;
- m) perkotaan Sumbang;
- n) perkotaan Kembaran;
- o) perkotaan Karanglewas;
- p) perkotaan Kebasen;
- q) perkotaan Somagede;
- r) perkotaan Kedungbanteng; dan
- s) perkotaan Kalibagor.

B. Fungsi Pelayanan

Rencana fungsi pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Banyumas yakni PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), PKL (Pusat Kegiatan Lokal), dan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang berada di Perkotaan Purwokerto memiliki fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan. Perkotaan Purwokerto dalam lingkup internal merupakan pusat perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan tinggi, kesehatan, perbankan, sedangkan dalam lingkup eksternal merupakan salah satu pusat pertumbuhan di bagian barat provinsi Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah baik dalam kegiatan perdagangan khususnya pemasaran hasil pertanian, kegiatan pariwisata maupun pendidikan tinggi.
2. Pusat Kegiatan Lokal di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan yang bervariasi sesuai dengan kelengkapan sarana dan kecenderungan perkembangannya. Berikut ini fungsi pelayanan PKL di Kabupaten Banyumas, meliputi :
 - PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan, dan kesehatan di Kecamatan Banyumas;
 - PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Ajibarang;
 - PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten dan industri di Kecamatan Sokaraja; dan
 - PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri di Kecamatan Wangon;
3. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Banyumas memiliki fungsi pelayanan berupa pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2. Sistem Perdesaan

A. Pusat Kegiatan Pedesaan

Sistem perdesaan di Kabupaten Banyumas terdiri dari Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, meliputi Desa Cihonje (Kecamatan Gumelar), Desa Tipar (Kecamatan Rawalo), Desa Paningkaban (Kecamatan Gumelar),

Desa Jompo Kulon (Kecamatan Sokaraja), dan Desa Sidamulya (Kecamatan Kemranjen). Desa Pusat Pelayanan Lingkungan dititikberatkan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan pertanian dengan didukung fungsi infrastruktur pelayanan perdesaan dengan orientasi pelayanan dusun dan antar desa yang berdekatan.

B. Fungsi Pelayanan

Sistem permukiman perdesaan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Permukiman perdesaan akan menjadi penyeimbang pertumbuhan pusat dan wilayah belakang sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara perdesaan dan perkotaan;
- b) Permukiman perdesaan diarahkan menjadi tempat transformasi fungsi perkotaan kepada kawasan perdesaan, dan menjadi pusat distribusi dan koleksi sumber daya yang diperlukan bagi pengembangan wilayah perdesaan; dan
- c) Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian dan pelayanan, memperkuat keterkaitan (linkage) dengan daerah pusat, sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

Pembangunan kawasan perdesaan dititikberatkan pada pengembangan potensi pertanian yang merupakan sektor basis perekonomian di Kabupaten Banyumas. Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan berada di daerah perdesaan sedangkan kegiatan lainnya berlokasi di pusat pertumbuhan (desa kawasan agrowisata dan minapolitan) atau pusat pelayanan yang merupakan konsentrasi permukiman di satu titik lokasi dan daerah belakangnya (*hinterland*).

B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah dibagi menjadi rencana sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

1. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem prasarana utama pada wilayah Kabupaten Banyumas merupakan sistem jaringan transportasi darat dan jaringan transportasi perkeretaapian. Prasarana jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah ini diharapkan dapat menampung pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah terpencil/tertinggal, serta mendukung keterkaitan antar pusat pelayanan secara hirarkis sebagaimana

yang telah ditentukan dalam struktur tata ruang pada sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Secara umum Kabupaten Banyumas merupakan simpul pergerakan transportasi dari wilayah sekitarnya.

1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a. Jaringan jalan

Adapun jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

a) Jaringan Jalan Nasional Pada Wilayah Kabupaten

Jaringan jalan nasional dalam pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas membentang dari :

1) Pengembangan jalan arteri primer meliputi:

- jalan penghubung Karangpucung – Wangon dengan panjang ruas 21,498 km;
- jalan penghubung Rawalo – Sampang dengan panjang ruas 4,134 km;
- jalan penghubung Sampang – Buntu dengan panjang ruas 8,808 km;
- jalan penghubung Wangon – Batas Banyumas Tengah dengan panjang ruas 5,696 km;
- jalan penghubung Purwokerto – Patikraja dengan panjang ruas 5,876 km; dan
- jalan penghubung Patikraja – Rawalo dengan panjang ruas 9,150 km.

2) Pengembangan jalan kolektor primer meliputi:

- jalan penghubung Wangon – Menganti dengan panjang ruas 11,598 km;
- jalan penghubung Menganti – Rawalo dengan panjang ruas 2,499 km;
- jalan penghubung Buntu – Banyumas dengan panjang ruas 8,551 km;
- jalan penghubung Banyumas – Batas Banyumas utara dengan panjang ruas 8,311 km;
- jalan penghubung Batas Banyumas Tengah – Klampok dengan panjang ruas 10,049 km;
- jalan penghubung Batas Kabupaten Tegal – Ajibarang dengan panjang ruas 10,254 km;

- Jalan penghubung Ajibarang – Wangon dengan panjang ruas 12,979 km;
- jalan penghubung Ajibarang – Batas Kota Purwokerto dengan panjang ruas 13,548 km;
- jalan penghubung Batas Kota Purwokerto – Sokaraja dg. panjang ruas 4,898 km;
- jalan penghubung Sokaraja – Kaliori dengan panjang ruas 5,809 km; dan
- jalan penghubung Kaliori – Banyumas dengan panjang ruas 2,697 km.
- Jalan Pattimura dengan panjang ruas 0,534 km;
- Jalan Yos Sudarso dengan panjang ruas 1,373 km;
- Jalan Sudirman dengan panjang ruas 6,126 km;
- Jalan Gerilya dengan panjang ruas 4,843 km;
- Jalan Veteran dengan panjang ruas 2,270 km;

b) Jaringan Jalan Provinsi Pada Wilayah Kabupaten

Jaringan jalan provinsi yang berada di Kabupaten Banyumas, meliputi :

- jalan penghubung Purwokerto – Baturaden;
- jalan penghubung Sokaraja – Purbalingga;
- jalan penghubung Kaliori – Patikraja;
- jalan penghubung Menganti – Kesugihan;
- Jalan Dr. Gumbreg;
- Jalan Raden Patah;
- Jalan Sunan Bonang; dan
- Jalan Sunan Ampel.

c) Jaringan Jalan Kabupaten

Perencanaan sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan/pusat pelayanan melalui peningkatan fungsi dan perencanaan jalan-jalan baru yang berfungsi sebagai jalur jalan lingkar untuk mengarahkan kegiatan menerus yang melewati kawasan perkotaan, khususnya kawasan perkotaan yang cenderung berkembang pesat dengan fungsi sebagai PKW dan PKL. Pertimbangannya adalah untuk mengurangi konflik lalu lintas yang diakibatkan hambatan samping dari berbagai kegiatan perkotaan yang ada. Adapun pengembangan dan peningkatan jaringan jalan Kabupaten Banyumas adalah :

- Pengembangan Jalan lingkar Utara Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Kab. Purbalingga dan sekitarnya) ke arah Barat menuju

- Tegal, Jakarta dan sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;
- Pengembangan Jalan lingkar Selatan Sokaraja sebagai pengalih arus menerus dari arah Timur (Yogyakarta dan sekitarnya) ke arah Barat menuju Tegal, Jakarta dan sekitarnya, untuk mengurangi konflik lalu lintas di kawasan IKK Sokaraja;
 - Pengembangan jalan Pegalongan-Gunung Tugel-Purwokerto Selatan sehingga dapat berfungsi sebagai jalur jalan kolektor untuk mendukung pergerakan regional;
 - Pengembangan akses jalan (Sokaraja – Karangduren – Kalisogra Wetan – Kedungbenda – Kemangkong – Tidu – Wirasaba) menuju Bandara Wirasaba Kabupaten Purbalingga;
 - Peningkatan jalan penghubung jalan Jenderal Sudirman – jalan Gerilya;
 - Pengembangan akses jalan menuju kawasan pengembangan pertambangan Panas Bumi Baturaden; dan
 - Peningkatan jalan Dukuhwaluh-Kembaran-Purbalingga sehingga berfungsi sebagai jalur jalan kolektor.

b. Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

a) Terminal Penumpang

Rencana pengembangan sarana terminal di wilayah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1) Terminal Tipe A

Terminal penumpang tipe A ini melayani kendaraan umum untuk antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, dan angkutan perdesaan. Terminal ini harus terletak pada jaringan jalan arteri primer. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, terminal yang dikembangkan menjadi terminal penumpang tipe A di Perkotaan Purwokerto.

2) Terminal Tipe B

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar provinsi yang melalui. Terminal tipe B di Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada sub-

terminal yang sudah ada, yaitu di Kecamatan Ajibarang dan Wangon.

3) Terminal Tipe C

Terminal tipe ini melayani kendaraan umum terutama untuk angkutan perdesaan. Terminal tipe C pada Kabupaten Banyumas direncanakan dikembangkan pada ibu kota Kecamatan Sokaraja, Patikraja, Karanglewas, Purwojati, dan Banyumas.

b) Terminal Barang

Lokasi-lokasi pengembangan terminal barang adalah pada jalur transportasi nasional baik berupa transportasi jalan di Kecamatan Patikraja, Ajibarang, Wangon, dan Kemranjen serta terminal angkutan barang yang berbasis rel di Stasiun Notog Kecamatan Patikraja.

c. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengembangan sarana prasarana angkutan umum massal, meliputi:

a) Angkutan umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang melayani Perkotaan Purwokerto, kabupaten lain dan/atau kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Tengah;

b) Angkutan umum Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang melayani Perkotaan Purwokerto ke kota-kota lain di dalam Propinsi Jawa Tengah, meliputi:

- Purwokerto – Tegal – Brebes;
- Purwokerto – Purbalingga – Pemalang;
- Purwokerto – Banjarnegara – Wonosobo – Temanggung – Semarang;
- Purwokerto – Cilacap; dan
- Purwokerto – Kebumen – Purworejo – Magelang.

c) Angkutan pedesaan yang melayani pergerakan penduduk antara Perkotaan Purwokerto, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Ajibarang dengan Ibu Kota Kecamatan di wilayah Kabupaten, meliputi:

- Purwokerto – Kembaran dan/atau Sumbang dan/atau Baturraden;
- Ajibarang – Pekuncen dan/atau Gumelar dan/atau Cilongok;
- Wangon – Jatilawang dan/atau Purwojati dan/atau Rawalo – Kebasen;
- Wangon – Lumbir dan/atau Gumelar;
- Banyumas – Patikraja dan/atau Somagede; dan

- Sokaraja – Banyumas dan/atau Kembaran – Sumbang.

2) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kabupaten Banyumas memiliki banyak sungai, akan tetapi jaringan transportasi yang paling utama dalam struktur ruang adalah sistem jaringan jalan dan kereta api. Oleh karena itu, pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Banyumas berupa pengembangan angkutan sungai pada rencana wisata Sungai River Voyage yang meliputi:

1. pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage; dan
2. pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.

B. Jaringan Transportasi Perkeretaapian

1) Pengembangan Prasarana Kereta Api

Rencana pengembangan jaringan transportasi perkeretaapian di Kabupaten Banyumas, meliputi :

1. Pembukaan jalur kereta api komuter Purwokerto-Slawi, Purwokerto-Kutoarjo, dan Purwokerto-Wonosobo;
2. Pembangunan jaringan rel kereta api jalur ganda (*double track*), yaitu perencanaan pengembangan jalur rel *double track* yang meliputi :
 - a. Pengembangan jalur ganda Cirebon – Kroya;
 - b. Pengembangan jalur ganda Kroya – Kutoarjo.
3. Penertiban perlintasan sebidang yang tidak resmi pada jalur ganda Cirebon – Kroya –Kutoarjo.

2) Pengembangan Sarana Kereta Api

Pengembangan sarana kereta api di Kabupaten Banyumas yakni dengan melakukan pengembangan Stasiun Kereta Api di Kabupaten Banyumas melalui peningkatan stasiun-stasiun eksisting di wilayah Kabupaten Banyumas.

3) Peningkatan Pelayanan Kereta Api

Rencana peningkatan pelayanan kereta api di Kabupaten Banyumas, meliputi:

1. Peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
2. Jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

2. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi,

sistem jaringan sumberdaya air, dan jaringan prasarana wilayah lainnya.

A. Sistem Jaringan Prasarana Energi

Sistem jaringan prasarana energi dibagi menjadi jaringan pipa minyak dan gas bumi, jaringan transmisi tenaga listrik, dan gardu induk.

1. Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi
2. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
3. Tenaga Listrik

B. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan permukiman. Sistem jaringan telekomunikasi dapat dibagi menjadi dua yakni jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel.

1. Pembangunan Jaringan Telepon Kabel
2. Pembangunan Jaringan Telepon Nirkabel

C. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pengembangan Sistem jaringan sumberdaya air dapat dibagi menjadi tiga yakni pengembangan wilayah sungai, pengembangan sistem jaringan air bersih, dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

1) Sistem Wilayah Sungai

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air pada dasarnya adalah perencanaan pemanfaatan sumber daya air di Kabupaten Banyumas baik air yang di atas, pada, maupun di bawah permukaan bumi. Sedangkan 4 aspek yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air Kabupaten Banyumas adalah :

1. Aspek Perlindungan

Pemanfaatan sumber daya air yang ada harus memperhatikan aspek perlindungan untuk menghindari rusaknya atau hilangnya sumber – sumber mata air yang menjadi sumber utama potensi air baku. Maka dalam tata ruang apabila akan memanfaatkan lahan lindung maupun lahan konservasi air untuk kegiatan sosial ekonomi wajib memperhitungkan akibat yang akan muncul hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap sumber daya air yang ada di Kabupaten Banyumas.

2. Aspek Pengendalian

Pengendalian diperlukan untuk menghindari adanya eksploitasi yang berlebihan agar sumber – sumber mata air tetap terjaga.

3. Aspek Pengembangan

Sumber daya air yang merupakan kebutuhan dasar manusia bisa dikembangkan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga harian tetapi juga bisa di arahkan dan dikembangkan ke pengembangan potensi lainnya seperti industri air kemasan, pariwisata air, pembangkit listrik dan sebagainya.

4. Aspek Pemanfaatan

Sebagai sebuah potensi, sumber daya air harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat secara umum tetapi tetap harus berada di koridor pemanfaatan yang benar dan sustainable.

Konsep perencanaan sumber daya air Kabupaten Banyumas meliputi :

1. Pengelolaan Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto dan Wilayah Sungai Citanduy;
2. Peningkatan pengelolaan DAS Serayu, DAS Ijo, dan DAS Tipar di Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto;
3. Peningkatan pengelolaan DAS Cimeneg di Wilayah Sungai Citanduy;
4. Pembuatan embung untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir, meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kalibagor, dan Kecamatan Wangon.
5. Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan
6. Konservasi situ, meliputi:
 - a. Situ Pernasidi di Kecamatan Cilongok;
 - b. Situ Bamban di Kecamatan Jatilawang;
 - c. Situ Randegan di Kecamatan Wangon;
 - d. Situ Karanganyar di Kecamatan Jatilawang;
 - e. Situ Gununglurah di Kecamatan Cilongok; dan
 - f. Situ Tapak di Kecamatan Kemranjen.

2) Sistem Jaringan Irigasi

Kewenangan untuk pengelolaan jaringan sistem irigasi terdiri 3 kewenangan pengelolaan yang antara lain :

1. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Pusat
Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat mempunyai luas areal potensial seluas 6.578 ha sedangkan luas areal fungsionalnya sebesar 5.626 ha. Daerah irigasi tersebut

berada di daerah irigasi Tajum seluas 3.200 ha dan daerah irigasi Serayu 3.378 ha.

2. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Provinsi
Daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas memiliki 4.378 ha areal potensial dan 4.261 ha areal fungsional. Daerah irigasi tersebut meliputi :

- a. Daerah irigasi Adongbang Junjungan seluas 1.439 ha;
- b. Daerah irigasi Kedunglimus Arca seluas 1.288 ha;
- c. Daerah irigasi Banjaran seluas 1.200 ha;
- d. Daerah irigasi Kalisapi seluas 206 ha; dan
- e. Daerah irigasi Kebasen seluas 486 ha.

3. Daerah irigasi dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten

Daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten adalah daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya. Dengan luas 17.665 ha areal potensial serta 16.497 ha areal fungsional, daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi daerah irigasi yang terluas dalam kewenangannya dengan jumlah daerah irigasi sebanyak 653 DI. Dalam operasionalnya untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten terbagi menjadi dua yaitu daerah irigasi kewenangan pemerintah desa dan daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten.

Daerah irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas dari jenis irigasinya terdiri dari 3 daerah irigasi yaitu :

1. Daerah irigasi sederhana (9.826,27 ha atau 37 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas);
2. Daerah irigasi setengah teknis (4.045 ha atau 15 % dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas); dan
3. Daerah irigasi teknis (48 % atau seluas 12.604, 56 ha) dari seluruh areal fungsional irigasi di Kabupaten Banyumas).

Dengan kondisi di atas, maka rencana pengembangan jaringan sistem irigasi di Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Mengoptimalkan wilayah potensial pada daerah irigasi agar lebih fungsional. Optimalisasi tersebut dengan kegiatan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan terutama untuk daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten. Diharapkan dengan perbaikan jaringan sistem yang rusak bisa meningkatkan rasio terairi lebih dari 80 % karena berdasarkan data tahun 2008 rasio terairi pada wilayah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten baru mencapai 35,23 %;
2. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder untuk memperluas wilayah pertanian yang terlayani oleh irigasi teknis maupun setengah teknis; dan
3. Pengembangan dan pembangunan sistem irigasi tersier oleh perkumpulan petani pemakai air dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

3) Sistem Pengelolaan Air Baku

Konsep rencana pengembangan sistem pengelolaan air baku di Kabupaten Banyumas mengacu pada azas – azas pemanfaatan sumber daya air yang telah dibahas antara lain azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian. Dalam pemanfaatan air baku di Kabupaten Banyumas hal – hal yang perlu menjadi perhatian antara lain :

1. Kondisi eksisting pola pelayanan air minum dan rencana pengembangannya;
2. Ketersediaan sumber air baku beserta rencana pengembangannya; dan
3. Target MDG's 2031 untuk melayani kebutuhan air minum penduduk sampai dengan 80 % di tahun 2031; Proyeksi kebutuhan air minum Kabupaten Banyumas di tahun 2011 sebesar 437,083,056.00 liter per hari untuk 1.606.923 jiwa dan 537,256,848.0 liter per hari untuk 1.975.209 jiwa di tahun 2031, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 dokumen RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031.

Perencanaan pengembangan sistem jaringan air baku di Kabupaten Banyumas yang antara lain meliputi :

1. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku.

Pengembangan sistem penyediaan air baku dengan memanfaatkan air Sungai Serayu sebagai bahan bakunya dengan detail pelayanan sebagai berikut :

- a. Jaringan pelayanan air baku baru untuk wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik;
- b. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Somagede dan perbaikan pelayanan wilayah Banyumas, Sokaraja, dan Kalibagor dengan rencana kapasitas produksi 50 liter per detik;
- c. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak dengan rencana kapasitas produksi 60 liter per detik; dan
- d. Jaringan pelayanan air baku baru untuk IKK Kebasen dan Rawalo serta perbaikan pelayanan IKK Jatilawang, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen dan Purwokerto dengan rencana kapasitas produksi 250 liter per liter.

Selain itu, pemanfaatan air permukaan juga dilakukan pada sumber mata air atau embung yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Mata air baru yang bisa dikembangkan antara lain :

- a. Mata air Moprok untuk peningkatan pelayanan air bersih di Perkotaan Purwokerto;
- b. Mata air Duren dan Linseng untuk pengembangan pelayanan wilayah Sokaraja dan Kalibagor; dan
- c. Mata air Kaliumbul untuk pengembangan pelayanan wilayah Ajibarang dan Purwokerto Barat.

Beberapa mata air yang telah dimanfaatkan juga perlu perlindungan sumber mata air dari kerusakan lingkungan sehingga diharapkan mampu menjaga kuantitas dan kualitas produksi airnya. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kawasan penyangga maupun terhadap sumber mata air itu sendiri. Sumber – sumber mata air yang sudah dimanfaatkan sebagai sumber air bakunya antara lain:

- a. Mata air Kawung Carang I, II, III, dan IV;
- b. Mata air Sikampret;
- c. Mata air Sirah Jipang;
- d. Mata air Cideng, Pekuncen;
- e. Mata air Legok I, II, Pekuncen;
- f. Mata air Pancasan, Ajibarang;
- g. Mata air Pugak, Banyumas;

- h. Mata air Gandatapa, Sumbang;
- i. Mata air Kepetek, Sumbang;
- j. Mata air Karang Tengah, Cilongok;
- k. Mata air Baturaden I, II, III;
- l. Mata air Kedung Pete, Baturaden;
- m. Mata air Kaliraga, Baturaden;
- n. Mata air Kali Umbul, Ajibarang;
- o. Mata air KarangSalam, Baturaden; dan
- p. Mata air Kesegeran, Ajibarang.

Selain kawasan lindung mata air, dalam melindungi mata air juga menggunakan kawasan lindung sempadan mata air yang meliputi diameter 200 m di sekeliling mata air tersebut. Pengaturan pada kawasan sempadan mata air ini adalah :

- a. Pada kawasan sekitar mata air ini, jenis kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan vegetatif dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Atau, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang;
 - c. Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air; dan
 - d. Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembangunan, rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
 3. Pengembangan jaringan perpipaan air minum dalam memperluas jangkauan pelayanan.
 4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku.

D. Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi sistem persampahan, sistem jaringan air limbah, sistem jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi, dan sistem pelayanan fasilitas umum dan sosial.

1) Sistem Persampahan

Pengembangan sistem persampahan di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengelolaan persampahan rumah tangga berbasis masyarakat dengan konsep 3R, yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (mengggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang);
- b. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor dan Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah tersebut dengan sistem sanitary landfill.
- c. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis.
- d. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Pengembangan sistem jaringan air limbah di Kabupaten Banyumas, meliputi:

- a. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik on site maupun off site pada kawasan perkotaan.
- b. Pengembangan IPAL untuk penanganan air buangan industri pada kawasan peruntukan industri

3) Sistem Jaringan Drainase

Rencana sistem jaringan drainase Kabupaten Banyumas yang perlu untuk dikembangkan antara lain :

1. Inventarisasi saluran yang berfungsi sebagai jaringan drainase
2. Pembuatan rencana induk drainase di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan cakupan :
 - a) Strategi umum pengelolaan sistem drainase;
 - b) Strategi pengembangan teknis sistem drainase;
 - c) Strategi pengembangan kelembagaan; dan
 - d) Strategi pengembangan pendanaan.
3. Penertiban dan perlindungan terhadap jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan

4. Pengembangan sumur resapan air hujan dan biopori pada kawasan perkotaan.

4) Jalur Evakuasi Bencana Alam dan Bencana Geologi

1. Jalur evakuasi bencana gunung api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

- a) Kecamatan Sumbang : Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
- b) Kecamatan Baturraden : Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemitug Lor.
- c) Kecamatan Karanglewas : Desa Sunyalangu.
- d) Kecamatan Kedungbanteng : Desa Melung, Kotaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
- e) Kecamatan Cilongok : Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

Jalur evakuasi bencana terutama dari kawasan rawan bencana III dan II. Adapun jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan rawan bencana meliputi :

- a) Kecamatan Sumbang jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden-Sumbang;
- b) Kecamatan Baturaden jalur evakuasinya adalah ruas jalan Baturaden - Purwokerto dan ruas jalan Baturaden - Kebumen - Purwosari;
- c) Kecamatan Kedungbanteng jalur evakuasinya adalah ruas jalan Melung-Kotaliman, ruas jalan Karangnangka - Beji - Purwosari, ruas jalan Kedungbanteng - Pondok Klakah dan ruas jalan Peninis-Keniten- Sokawera;
- d) Kecamatan Cilongok jalur evakuasinya adalah ruas jalan Menggala-Tumiyang-Lebaksiu-Karangtengah-Karanglo; dan
- e) Kecamatan Karanglewas jalur evakuasinya adalah ruas jalan Babakan-Sunyalangu-Singasari.

2. Jalur evakuasi bencana banjir

Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana banjir yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak. Adapun jalur evakuasi berupa jalan-jalan desa menuju pada lokasi yang tidak terkena bahaya banjir. Jalur evakuasi direncanakan di masing-masing kecamatan

rawan bencana banjir yang meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Tambak.

3. Jalur evakuasi bencana tanah longsor

Pada wilayah Kabupaten Banyumas terdapat daerah yang berpotensi daerah rawan bencana tanah longsor yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Rawalo. Jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi.

4. Ruang evakuasi bencana alam dan bencana geologi

Lokasi evakuasi bencana yaitu dengan memanfaatkan fasilitas umum di masing-masing wilayah meliputi :

- a. Lapangan terbuka;
- b. Sekolah;
- c. Kantor-kantor pemerintah; dan
- d. Puskesmas.

5) Sistem Pelayanan Fasilitas Umum dan Sosial

Pelayanan fasilitas umum dan sosial yang dikembangkan di setiap kecamatan sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dan skala pelayanannya adalah pengembangan fasilitas pelayanan masyarakat, meliputi :

- pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan perdagangan, yang direncanakan dalam perwujudan rencana struktur ruang pada pengembangan pusat kegiatan, dan
- pengembangan fasilitas rekreasi dan/atau olahraga yang direncanakan pada rencana pola ruang kawasan peruntukan pariwisata.

3.3.2 Hasil Telaah Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri atas:

1. Sistem Pusat Kegiatan yang meliputi Sistem Perdesaan dan Sistem Perkotaan.

Sistem Perdesaan terdiri atas Pusat Kegiatan Perdesaan dan Fungsi Pelayanan pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan utama pendidikan dan perdagangan dan jasa yang melayani kegiatan skala antar desa.

Sedangkan Sistem Perkotaan terdiri atas :

- Pusat Kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Purwokerto, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, dan perkotaan Wangon dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi 19 perkotaan Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
 - Fungsi Pelayanan meliputi PKW Purwokerto dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan berskala regional, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perbankan, PKL Perkotaan Banyumas dengan fungsi pelayanan utama berupa pemerintahan dan kesehatan di Kecamatan Banyumas, PKL Perkotaan Ajibarang dengan fungsi pelayanan utama berupa kesehatan, transportasi, industri, dan perdagangan skala kabupaten, PKL Perkotaan Sokaraja dengan fungsi pelayanan utama berupa pendidikan, kesehatan, perdagangan skala kabupaten, dan industri, PKL Perkotaan Wangon dengan fungsi pelayanan utama berupa perdagangan skala kabupaten, transportasi, dan industri, dan PPK dengan fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
2. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah terdiri atas sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi perkeretaapian, serta sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan transportasi darat meliputi :

- Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan (jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten, jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten dan jaringan jalan Kabupaten); jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang; jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan angkutan pedesaan.
- Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai *Serayu River Voyage*.

Tabel 3.4.a. Tabel Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Peningkatan jalan arteri primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Patikraja
			Peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Nasional	Wangon, Rawalo, Buntu, Banyumas, Purwokerto, Ajibarang, Sokaraja
			Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi	Upaya pengajuan usulan penanganan jalan Provinsi	Purwokerto, Baturraden, Sokaraja, Patikraja, Rawalo
			Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten	Upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan kabupaten	Sokaraja, Purwokerto, tambak, sumpiuh, Baturraden
2	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air	Pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya pembangunan bangunan pengaman tebing sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas
			Normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu – Bogowonto	Upaya normalisasi sungai	Rawalo, Kebasen, Patikraja, Kalibagor, Banyumas
			pembuatan embung	Upaya pembuatan embung	Kemranjen, Kalibagor, Wangon
			konservasi situ	Upaya konservasi situ	Cilongok, Jatilawang, Wangon, dan Kemranjen
			Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Upaya reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air	Upaya konservasi sumber air baku	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Upaya pemeriksaan kualitas sumber air baku tradisional secara berkala	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
			Peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas

3.3.3 Pola Ruang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, maka pengembangan Kabupaten Banyumas memperhatikan pola ruang dan struktur ruang wilayah Kabupaten Banyumas.

Pola Ruang wilayah Kabupaten Banyumas meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

3.4.3.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banyumas adalah kawasan hutan lindung, kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana.

Kawasan lindung ini terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air,
- c. kawasan perlindungan setempat; terdiri atas kawasan sekitar mata air, kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 (lima ribu empat ratus dua puluh satu) hektar.
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kebun raya; berupa Kebun Raya Baturaden di Kecamatan

Baturaden dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Karanglewas, Perkotaan Purwokerto dan Kecamatan Sumbang.

- e. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan bencana tanah gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana angin topan.
- f. Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan imbuhan air meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Kroya; dan Cekungan Air Tanah Cilacap dan kawasan rawan bencana geologi berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet.
- g. Kawasan lindung lainnya terdiri atas : kawasan lindung plasma nutfah; di Kecamatan Baturaden dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat meliputi Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banyumas.

A. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan lindung yang termasuk kategori kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 9.121 (sembilan ribu seratus dua puluh satu) hektar meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Sumbang.

Kawasan hutan lindung tersebar di wilayah sebagai berikut :

- a. Kawasan hutan lindung di Wilayah Gunung Slamet, meliputi Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang.
- b. Kawasan hutan yang memanjang dari Kecamatan Rawalo, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Banyumas.
- c. Kawasan hutan di bagian Barat Kabupaten Banyumas, meliputi Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang, dan Kecamatan Purwojati.

B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Berdasar atas identifikasi terhadap kondisi fisik kawasan sesuai dengan kriteria kawasan yang curah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-

besaran, maka perlindungan terhadap kawasan resapan air meliputi wilayah Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kedungbanteng, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pekuncen, sebagian kecil wilayah Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil wilayah Kecamatan Purwojati, sebagian kecil wilayah Kecamatan Somagede, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kalibagor, sebagian kecil wilayah Kecamatan Sokaraja, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Kembaran.

Wilayah-wilayah ini pada musim penghujan akan mampu menyerap air dan pada musim kemarau mampu menjadi sumber cadangan air saat diperlukan. Beberapa pokok pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang masih boleh dilakukan pada kawasan ini adalah pertanian semusim atau tahunan, dan agrowisata yang disertai tindakan konservasi;
2. Tidak diperbolehkan pembukaan lahan untuk permukiman baru dan kawasan industri pada daerah dengan kelerengan di atas 25 %;
3. Pada daerah dengan kelerengan kurang dari 25 %, pembangunan permukiman baik secara masal maupun perseorangan, infrastruktur dan kawasan industri dapat dilakukan dengan syarat telah terpasang/tersedia sistem pengelolaan limbah yang baik dan tidak mengambil air tanah secara besar-besaran. Disamping itu harus tetap memperhatikan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) sehingga masih ada lahan untuk resapan air; dan
4. Eksploitasi bahan galian dibatasi atau dilengkapi dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi.

C. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan.

a. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan ini merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Pada kawasan ini diarahkan menjadi kawasan bebas fisik bangunan (*buffer zone*) sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Berdasar identifikasi yang telah dilakukan, terdapat banyak mata air dan kawasan sekitarnya yang perlu dilindungi, yaitu seperti pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4. 1 Rencana Sumber Mata Air Yang Dilindungi Di Kabupaten Banyumas

Nama Mata Air	Debit (lt/dt)	Lokasi Sumber Mata Air (Kecamatan)
Mata air Kawungcarang	148	Sumbang
Mata air Gandatapa	5	Sumbang
Mata air Kepetek	5	Sumbang
Mata air Kedungpete	150	Baturaden
Mata air Kaliraga	5,6	Baturaden
Mata air Baturaden I, II, III	16,1	Baturaden
Mata air Pugak	1,4	Banyumas
Mata air Sikampret	15	Karanglewas
Mata air Sirah	25	Karanglewas
Mata air Cideng	3,3	Pekuncen
Mata air Rancah	2	Pekuncen
Mata air Legok I, II	35	Pekuncen
Mata air Pancasan	25	Ajibarang
Mata air Karangtengah	5	Cilongok
Mata air Sungai Tajum	10	Purwojati

Sumber : Tabel 4.1 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Arahan pengelolaan kawasan lindung sekitar mata air ini adalah sebagai berikut:

1. Persawahan atau pertanian dengan jenis tanaman tertentu, dan perikanan masih diperkenankan keberadaannya pada kawasan ini;
2. Tindakan konservasi yang dilakukan pada kawasan ini lebih bersifat vegetatif; dan
3. Kawasan sekitar mata air dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum/air bersih masyarakat.

b. **Kawasan Sempadan Sungai**

Kawasan ini meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai, termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kanan dan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan dan kiri sungai kecil di luar kawasan permukiman dan untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004, sungai besar adalah sungai yang daerah pengalirannya lebih dari 500 km², untuk itu di Kabupaten Banyumas tidak mempunyai sungai besar.

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya;

2. Kegiatan diarahkan perlindungan dan memperkuat serta pengaturan aliran air, yaitu meliputi kegiatan penanaman tanaman keras, atau perlindungan tebing dengan beton dan krib pengendali saluran air;
3. Sedangkan untuk sungai yang melalui kawasan permukiman, dapat dilakukan dengan pembuatan jalan inspeksi;
4. Terhadap pemanfaatan sungai untuk pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan hidup.

c. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan seluas kurang lebih 5.421 hektar atau 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah, yang meliputi perkotaan Purwokerto, perkotaan Banyumas, perkotaan Ajibarang, perkotaan Sokaraja, perkotaan Wangon, perkotaan Jatilawang, perkotaan Sumpiuh, perkotaan Patikraja, perkotaan Baturaden, perkotaan Cilongok, perkotaan Lumir, perkotaan Gumelar, perkotaan Pekuncen, perkotaan Purwojati, perkotaan Rawalo, perkotaan Kemranjen, perkotaan Tambak, perkotaan Sumbang, perkotaan

Tabel 4. 3 Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Banyumas

NO.	LOKASI			RUANG TERBUKA HIJAU (Ha)									
	Nama Perkotaan	Fungsi Kegiatan	Luas Perkotaan	EKSISTING	%	RENCANA 5 Tahun Ke I	%	RENCANA 5 Tahun II	%	RENCANA 5 Tahun III	%	RENCANA 5 Tahun IV	%
1	Purwokerto	PKW	9.051,56	2.814,11	31,09	2.801,34	30,95	2.786,3	30,78	2.762,12	30,52	2.748,91	30,37
2	Banyumas	PKL	444,18	148,55	33,44	146,6	33	144,4	32,51	142,24	32,02	140,11	31,54
3	Ajibarang	PKL	402,14	133,9	33,3	31,89	32,8	129,91	32,3	127,96	31,82	126,05	31,34
4	Sokaraja	PKL	312,71	104,51	33,42	102,94	32,92	101,39	32,42	99,87	31,94	98,38	31,46
5	Wangon	PKL	946,9	321,18	33,92	316,36	33,41	311,61	32,91	306,94	32,42	302,34	31,93
6	Jatilawang	PPK	257,79	89,32	34,65	88,43	34,3	87,55	33,96	86,67	33,62	85,81	33,29
7	Sumpiuh	PPK	688,88	235,88	34,24	233,52	33,9	231,19	33,56	228,87	33,22	226,59	32,89
8	Patikraja	PPK	55,42	19,9	35,91	19,7	35,55	19,5	35,19	19,31	34,84	19,12	34,5
9	Baturaden	PPK	142,62	54,36	38,12	53,81	37,73	53,28	37,36	52,74	36,98	52,22	36,61
10	Cilongok	PPK	651,44	230,16	35,33	227,86	34,98	225,58	34,63	223,33	34,28	221,1	33,94
11	Lumbir	PPK	525,11	198,72	37,84	196,73	37,46	194,76	37,09	192,81	36,72	190,89	36,35
12	Gumelar	PPK	592,29	214,93	36,29	212,79	35,93	210,66	35,57	208,55	35,21	206,47	34,86
13	Pekuncen	PPK	187,59	68,86	36,71	68,17	36,34	67,49	35,98	66,81	35,61	66,15	35,26
14	Purwojati	PPK	161,65	55,81	34,53	55,26	34,18	54,7	33,84	54,16	33,5	53,62	33,17
15	Rawalo	PPK	191,12	70,66	36,97	69,95	36,6	69,25	36,23	68,56	35,87	67,88	35,52
16	Kemranjen	PPK	359,83	124,69	34,65	123,44	34,31	122,21	33,96	120,98	33,62	119,78	33,29
17	Tambak	PPK	579,85	207,83	35,84	205,76	35,49	203,7	35,13	201,66	34,78	199,65	34,43
18	Sumbang	PPK	315,29	108,58	34,44	107,5	34,1	106,42	33,75	105,36	33,42	104,31	33,08
19	Kembaran	PPK	104,96	39,28	37,42	38,89	37,05	38,5	36,68	38,12	36,32	37,74	35,96

NO.	LOKASI			RUANG TERBUKA HIJAU (Ha)									
	Nama Perkotaan	Fungsi Kegiatan	Luas Perkotaan	EKSISTING	%	RENCANA 5 Tahun Ke I	%	RENCANA 5 Tahun II	%	RENCANA 5 Tahun III	%	RENCANA 5 Tahun IV	%
20	Karanglewas	PPK	125	45,92	36,74	45,47	36,38	45,01	36,01	44,56	35,65	44,12	35,3
21	Kebasen	PPK	138,32	48,6	35,14	48,11	34,78	47,63	34,43	47,16	34,09	46,69	33,76
22	Somagede	PPK	299,12	105,34	35,22	104,28	34,86	103,24	34,51	102,21	34,17	101,19	33,83
23	Kedungbanteng	PPK	287,6	103,38	35,95	102,34	35,58	101,32	35,23	100,31	34,88	99,31	34,53
24	Kalibagor	PPK	179,62	65,86	36,67	65,2	36,3	64,55	35,94	63,9	35,58	63,27	35,22
		JUMLAH	17.000,99	5.610,33	33	5.566,34	32,74	5.520,08	32,47	5.465,2	32,15	5.421,7	31,89

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Banyumas bertujuan :

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di wilayah perkotaan; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, teratur, bersih dan nyaman.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sarana memiliki fungsi untuk :

1. Fungsi Fisik, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Banyumas akan memberikan perlindungan berlangsungnya keberadaan ekologi, ekosistem dan penyangga kehidupan, yang secara berkelanjutan dan berkesinambungan berfungsi untuk : pemberi fungsi higienis (sarana kesehatan), pengatur iklim (klimatologis), perlindungan (protektif), penyedia air tanah (hidrologis), penyeimbang alam (edaphis), pencegah erosi (orologis), pencipta lingkungan hidup (ekologis);
2. Fungsi Psikis, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau akan menciptakan nilai cita rasa, estetika dan keindahan, keteduhan dan kenyamanan yang berpengaruh pada peningkatan kualitas sikap (attitude) dan perilaku (behaviour), sehingga dapat meningkatkan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan; dan
3. Fungsi Sosial Ekonomi, bahwa perencanaan, penataan, pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dapat menciptakan interaksi sosial serta akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, dan membuka peluang untuk fungsi penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan teknologi

Dengan tujuan dan fungsi yang akan dicapai tersebut maka komponen Ruang Terbuka hijau yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Permukiman;
2. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum;
3. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perdagangan dan Jasa;
4. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Pendidikan;
5. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Permakaman;
6. Ruang Terbuka Hijau pada area Pertamanan dan Lapangan;
7. Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Perhubungan dan Transportasi;
8. Ruang Terbuka Hijau pada area Pertamanan Kota;
9. Ruang Terbuka Hijau pada Jalur Transportasi dan Utilitas Kota;
10. Ruang Terbuka Hijau pada Jalur Jalan.

D. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Banyumas meliputi Kawasan Kebun Raya dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

a. Kawasan Kebun Raya

Kawasan Kebun Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan Kebun Raya di Kabupaten Banyumas berupa Kebun Raya Baturaden yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 117/Menhut-II/2004 dan berada di Kecamatan Baturaden.

b. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang melindungi atau melestarikan budaya bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada wilayah Kabupaten Banyumas, perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Rencana Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan Yang Dilindungi di Kabupaten Banyumas

No	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Dilindungi	Kecamatan
1	Masjid Saka Tunggal	Wangon
2	Museum Wayang Sendangmas	Banyumas
3	Museum BRI	Purwokerto
4	Museum Pangsar Jendral Sudirman	Karanglewas
5	Masjid Banyumas	Banyumas
7	Situs Lembu Ayu	Sumbang

Sumber : Tabel 4.3 RTRW Kab. Banyumas Tahun 2011-2031

Arahan pengelolaan pada kawasan perlindungan ini adalah pencegahan kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian situs purbakala dan lingkungannya serta pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kegiatan yang ada diarahkan pada kegiatan budaya yang mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam mendukung pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Banyumas, direncanakan pembangunan Kebun Raya Baturaden sebagai pusat penelitian dan konservasi di luar habitat. Selain itu, Kebun Raya Baturaden dapat berfungsi pula sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung.

E. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi bencana rawan tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan.

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Penentuan kawasan rawan bencana longsor dilakukan melalui penentuan tipologi kawasan yang dilanjutkan dengan penentuan tingkat kerawanan. Kawasan rawan bencana longsor dibedakan atas zona-zona berdasarkan karakter dan kondisi fisik alamnya sehingga pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan intensitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya.

Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia.

Selanjutnya ditentukan kawasan rawan bencana tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, terdiri dari :

- a) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glempang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;
- b) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Pankingaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;
- c) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
- d) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
- e) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;
- f) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;
- g) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
- h) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
- i) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
- j) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
- k) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;

- l) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendap;
- m) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
- n) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
- o) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpenapen, Ketanda dan Bogangin;
- p) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
- q) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir sedapat mungkin tidak dipergunakan untuk permukiman, demikian pula kegiatan lain yang dapat merusak atau mempengaruhi kelancaran sistem drainase. Pada wilayah Kabupaten Banyumas kawasan perlindungan bahaya banjir terdapat pada

1. Kecamatan Wangon;
2. Kecamatan Jatilawang;
3. Kecamatan Sumpiuh;
4. Kecamatan Kemranjen; dan
5. Kecamatan Tambak.

Pada daerah rawan banjir ini perlu adanya pemantapan kawasan lindung diantaranya dengan langkah reboisasi jenis tanaman khusus (tanaman tahunan).

c. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan

Kawasan rawan bencana lainnya yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas adalah bencana angin topan. Kawasan bencana ini umumnya bersifat temporer, baik secara lokasi maupun waktu. Namun demikian, pada kawasan-kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana ini, sedapat mungkin diadakan pembatasan dalam kegiatan budidaya, khususnya permukiman. Mekanisme dan prosedur penanganan, pencegahan akibat bencana dan pengungsian penduduk perlu dilakukan sedini mungkin.

Adapun kawasan yang mempunyai kecenderungan terjadi bencana angin topan, meliputi :

1. Kecamatan Kedungbanteng;
2. Kecamatan Karanglewas;
3. Kecamatan Baturaden; dan
4. Kecamatan Sumbang.

F. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan imbuhan air dan kawasan rawan bencana geologi.

a. **Kawasan Imbuhan Air**

Kawasan imbuhan air di Kabupaten Banyumas yakni kawasan cekungan air Purwokerto-Purbalingga, cekungan air Tanah Kroya, dan cekungan air Tanah Cilacap. Kawasan Imbuhan air merupakan kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. Memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. Memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

b. **Kawasan Rawan Bencana Geologi**

Kawasan rawan bencana geologi di Kabupaten Banyumas berupa kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi di sekitar Gunung Slamet. Menurut Permen PU No. 21/PRT/M/2007, kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi. Untuk penentuan tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, tipologi kawasan rawan letusan gunung berapi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe sebagai berikut :

A. Tipe A

1. Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).

B. Tipe B

1. Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun; dan
2. Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar).

C. Tipe C

1. Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus; dan
2. Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada di sekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri).

G. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi kawasan lindung plasma nutfah dan kawasan lindung yang dikelola masyarakat.

a. Kawasan Lindung Plasma Nutfah

Kawasan lindung lainnya yang ditetapkan di Kabupaten Banyumas adalah kawasan perlindungan plasma nutfah di Kecamatan Baturaden. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah adalah kawasan yang memiliki jenis plasma nuttuh tertentu yang belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

b. Kawasan Lindung Yang Dikelola Masyarakat

Kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung akan tetapi dimiliki dan atau dikelola oleh masyarakat. Kawasan lindung ini merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung.

Kawasan lindung yang dikelola masyarakat adalah di Kabupaten Banyumas tersebar di Kecamatan Lumbir, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Somagede, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, dan Kecamatan Sumbang.

3.4.3.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

- Kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 13.949 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar meliputi 17 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - Kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 5.592 (lima ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi 10 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Kawasan hutan rakyat
Kawasan hutan rakyat meliputi 15 Kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas.
 - c. Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 36.616 (tiga puluh enam ribu enam ratus enam belas) hektar tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas.
 - d. Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektar dengan komoditas unggulan berupa Ikan Gurame dan Ikan Lele, pengolahan perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral, kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta kawasan pertambangan panas bumi yang direncanakan pada wilayah kerja pertambangan panas bumi seluas kurang lebih 15.490 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektar.
 - f. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan wisata alam, kawasan wisata buatan, wisata belanja dan kuliner yang dikembangkan sebagai lokasi wisata yang menjajakan makanan dan buah tangan khas Banyumas, serta kawasan wisata budaya.
 - g. Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan menengah serta industri kecil dan mikro. Industri besar dan menengah seluas kurang lebih 580 (lima ratus delapan puluh) hektar meliputi Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Wangon dan Kecamatan Ajibarang. Industri besar dan menengah dapat dikembangkan di luar kecamatan dengan kriteria industri yang menggunakan bahan baku lokal dan tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Industri kecil dan mikro ada di setiap kecamatan, dan dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan dengan syarat tidak menghasilkan limbah yang berkategori Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h. Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan perkotaan dan perdesaan. Kawasan perkotaan memiliki fungsi utama berupa pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, perdagangan, dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perkotaan adalah

untuk melengkapi kawasan yang tumbuh menjadi kawasan perkotaan baru dengan sarana dan prasarana yang memadai, dan untuk melengkapi kawasan perkotaan dengan RTH dan/atau taman kota sesuai perundang-undangan, sedangkan pengaturan izin lokasi untuk pengembang perumahan diarahkan ke kawasan yang mulai tumbuh dengan penanganan yang agregatif. Kawasan Perdesaan memiliki fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan, meliputi kawasan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kawasan perdesaan terletak diluar kawasan perkotaan. Rencana pengembangan kawasan perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman yang diarahkan menyebar terutama pada simpul kegiatan (*nodes*), membuka hubungan pusat kegiatan dengan kantong permukiman perdesaan dan menciptakan pola permukiman yang mampu menampung kegiatan pengolahan pertanian berupa kerajinan, industri kecil, dan pariwisata.

- i. Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi Instalasi Militer yaitu Korem 071 Wijayakusuma di Kecamatan Sokaraja, Kodim 0701 / Banyumas di Kecamatan Purwokerto Barat dan Yonif 405 Suryakusuma di Kecamatan Wangon; Instalasi Militer Kodim 0701 / Banyumas meliputi Koramil 01-25 Kabupaten Banyumas; Kantor Polisi Resor (Polres) di Kecamatan Purwokerto Utara; dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.

Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

1. Kawasan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan perkotaan Purwokerto dan sekitarnya.
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan panas bumi Baturaden.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan Kebun Raya Baturaden dan kawasan Gunung Slamet.
2. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu :
 - Kawasan perkotaan Purwokerto meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Barat, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Kembaran, sebagian

Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Sokaraja dan sebagian Kecamatan Patikraja.

- Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Cilongok, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
 - Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kemranjen dan Kecamatan Cilongok.
 - Kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Wangon, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbrir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Tambak.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan Kota Lama Banyumas, kawasan Masjid Saka Tunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, kawasan Desa Tradisional di Desa Plana, Kecamatan Somagede dan kawasan Budaya Tradisional Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan pariwisata Baturaden.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Gunung Slamet meliputi Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.

3.3.4 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel 3.4.3. Tabel Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

N o	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Perlindungan Setempat	Pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sekitar mata air	Rasio jumlah mata air yang berfungsi baik	(Pendukung)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
			Penataan Kawasan sekitar sempadan sungai	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
			Penertiban bangunan di sempadan sungai	Penurunan Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
			Pembangunan jalur hijau pada sempadan sungai, tepi jalan dan/atau median jalan;	Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dan penggunaan lain	(Pendukung)
2	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Rawan Bencana Alam	Penanaman tanaman konservasi pada kawasan rawan bencana tanah longsor	Turap/talud/bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	(Pendukung)
3	Kawasan Lindung Geologi	Kawasan Lindung Geologi	Pelestarian Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga;	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Kroya; dan	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pelestarian Cekungan Air Tanah Cilacap.	Konservasi Sumber Daya air	(Pendukung)
			Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah	Rasio jaringan irigasi (m/ha)	Seluruh wilayah di Kab. Banyumas
4	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata air Serayu River Voyage	Konservasi sumber daya air	(Pendukung)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5	-6
5	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi;	Peningkatan Rasio Panjang Jalan dan Rasio Irigasi	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
6	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Perlindungan keseimbangan tata guna air	Peningkatan Rasio jumlah embung/situ yang dimanfaatkan untuk sumber air baku	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna	Konservasi Sumber daya air	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			rehabilitasi daerah rawan bencana longsor	Penurunan Rasio jumlah daerah kritis di badan sungai	Seluruh daerah di Kab. Banyumas
			penanganan dampak lingkungan	Pembangunan Turap / talud / bronjong di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Seluruh daerah di Kab. Banyumas

3.3.5 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, gerakan tanah, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak. Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, kolam ikan,

kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. Pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaman tahunan masih dapat dilakukan dengan tujuan untuk konservasi lahan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah yang meliputi 18 Kecamatan yaitu Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Somagede, Kecamatan Wangon, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Kalibagor. Potensi wilayah rawan bencana gerak tanah di Kabupaten Banyumas dapat disebabkan salah satunya karena faktor kemiringan lereng.

2. Potensi Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah Kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir. Wilayah-wilayah tersebut terdapat pada bagian selatan yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak. Ancaman bencana banjir dikarenakan tingginya angka lahan kritis di daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Disamping itu tidak lepas dari pengaruh topografi di wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen yang berupa cekungan.

3. Potensi Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kecamatan Baturraden, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng, Cilongok dan Pekuncen.

4. Potensi Rawan Bencana Kekeringan

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain di wilayah meliputi Kecamatan Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, Pekuncen, dan pada beberapa desa yang sulit air meliputi wilayah di Kecamatan Baturraden dan Kedungbanteng.

5. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok,

Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Somagede.

3.3.6 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan Kawasan Strategis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 s/d 2031 sesuai pada tabel 3.4.4.a

Tabel 3.4.4.a Tabel Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
1	PILAR LINGKUNGAN Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	Peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukung Instalasi Pengolah Air.	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
			Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai, mata air dan waduk untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem tata kelola air dan banjir.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi	Memfasilitasi penghematan air pertanian melalui kelompok P3A dan memberikan insentif bagi petani yang dapat melakukan penghematan air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
			Menerapkan sistem pertanian hemat air yang dapat menekan	

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
		jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	penggunaan air sampai 30%	
	Menjadikan Kota Dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh Dan Berkelanjutan.	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	Peningkatan akses rumah sebesar 89,21% terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan dukungan akses Jalan ke wilayah pemukiman melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan.
		Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif	Membangun infrastruktur yang berfungsi untuk resiko bencana melalui Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong, Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan, Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan, serta jaminan infrastruktur yang andal melalui dukungan Jasa konstruksi yang berkualitas melalui Program Pembinaan Jasa Konstruksi
		Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang	Peningkatan layanan sampah perlu ditingkatkan sampai 20% terhadap seluruh	Meningkatkan dukungan akses Jalan yang berfungsi dalam jalur pengelolaan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
-1	-2	-3	-4	-5
		merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	<p>sumber timbunan kabupaten</p> <p>Peningkatan layanan sampah perkotaan ditingkatkan sampai 100%</p> <p>Pembukaan TPST baru sebagai alternatif TPA</p>	<p>sampah melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan</p>
		Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	<p>Meningkatkan penyediaan RTH di daerah perkotaan.</p> <p>Menurunkan emisi GRK dari sektor transportasi melalui pengembangan transportasi umum masal, manajemen lalu lintas termasuk manajemen parkir untuk mengurangi kemacetan lalu lintas</p>	<p>Meningkatkan dukungan akses Jalan menuju ruang publik, serta membangun jalan yang dilengkapi pohon peneduh melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan</p>
	Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Menyediakan jalur evakuasi bencana melalui Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

3.4 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS :

3.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan infrastruktur PUPR di Kabupaten Banyumas dapat

dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

- a. Kurang optimalnya layanan jaringan irigasi kewenangan kabupaten
Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 573 DI dengan luas 23.716 Ha, dan jaringan irigasi sepanjang 664.440 m. Jaringan irigasi dalam kondisi baik sepanjang 539.566 m (81,21%) sedangkan jaringan irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 124.874 m (18,79%). Masih adanya kerusakan pada jaringan irigasi menyebabkan layanan jaringan irigasi kurang optimal terutama pada wilayah hilir yang kurang mendapatkan air.
- b. Kurang memadainya bangunan penampung air baku dalam kondisi baik
18 buah bangunan embung/situ/telaga dan bangunan penampung air baku di Kabupaten Banyumas, 3 bangunan dalam kondisi rusak. Sehingga tidak memadai untuk menampung air baku secara optimal.
- c. Belum memadainya kondisi jalan kabupaten kabupaten
Kondisi mantap jalan Kabupaten Banyumas masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kondisi mantap jalan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas baru tercapai 81,25% atau 1.225,24 km dari total panjang jalan 1.508 km.
- d. Belum memadainya infrastruktur pengendali banjir dan tanah longsor
Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 baru terealisasi sebesar 52,31% sedangkan target sebesar 53%.
- e. Kurangnya fasilitasi dan Pembinaan SDM Jasa Konstruksi
Capaian kinerja program pengembangan jasa konstruksi sudah terealisasi sebesar 36,56% dan sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 30,27% serta target akhir RPJMD sebesar 35,11%, namun demikian capaian ini baru menjangkau sebagian SDM jasa konstruksi yang menjadi target program, masih terdapat SDM jasa

konstruksi yang belum mendapat fasilitasi dan pembinaan.

- f. Kurangnya perencanaan penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis

Pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum mulai melaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan yang sebagian besar didanai dengan menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan total luas kawasan yang dilakukan penataan mencapai 22.154 m². Namun demikian masih banyak bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis yang perlu ditangani.

- g. Belum optimalnya penataan Bangunan gedung

Capaian kinerja bangunan gedung Pemerintah Daerah yang dikelola baru terealisasi sebesar 62% sehingga belum mencapai target tahun 2022 sebesar 72,7% serta target akhir RPJMD sebesar 75,7%. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah bangunan gedung Pemerintah Kabupaten Banyumas yang kewenangan pengelolaan gedungnya dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terinventarisir sebanyak 86 unit berupa gedung kelurahan sebanyak 30 unit, bangunan kecamatan sebanyak 27 unit, dan bangunan perangkat daerah sebanyak 27 unit, dengan rincian kondisi bangunan 60,47% kondisi baik, 26,74% kondisi rusak ringan, 10,47% rusak sedang, dan 2,33% rusak berat. Dari 86 unit bangunan yang dikelola, terdapat 39,53% atau 34 unit dalam kondisi rusak.

- h. Kurangnya infrastruktur persampahan

Persentase peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 adalah 187,6%. Meskipun target peningkatan telah tercapai, berdasarkan kajian evaluasi persampahan yang telah dilaksanakan, kebutuhan sarana pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas masih belum terpenuhi khususnya peralatan mesin pengolah sampah dan kendaraan pengangkut sampah. Kebutuhan peralatan mesin pengolah sampah dan kendaraan pengangkut sampah perlu ditambah untuk memaksimalkan pengelolaan sampah.

- i. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas (Air Minum dan Air Limbah)

Meskipun persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten sudah mencapai target di tahun 2022 yaitu sebesar (76,99%), namun belum mencakup seluruh penduduk Kabupaten Banyumas. Selain itu perlu ke depan perlu diupayakan akses air minum yang aman.

Pada tahun 2022 persentase rumah tinggal berakses sanitasi mencapai 90%. Meskipun sudah mencapai target di tahun 2022 namun capaian tersebut belum mencakup seluruh penduduk sebagaimana ketentuan standar pelayanan minimal. Capaian tersebut juga masih terbatas akses layak, belum mencapai akses aman. Capaian akses sanitasi aman masih rendah karena belum optimalnya fungsi IPLT dan layanan lumpur tinja.

j. Permukiman

Hingga Tahun 2022 di Kabupaten Banyumas masih terdapat lingkungan permukiman kumuh perkotaan seluas 86,31 Ha.

k. Belum optimalnya perencanaan tata ruang

Hingga tahun 2022, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 masih dalam proses revisi. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sudah ditetapkan adalah RDTR Perkotaan Purwokerto 2019-2039, RDTR kawasan pusat kegiatan lokal lain seperti Sokaraja, Banyumas, Wangon, dan Ajibarang masih dalam proses penyusunan.

3.4.2 Isu Strategis

3.4.2.1 Isu Strategis Global

Tujuan Global SDGs adalah sebagai berikut :

1. Krisis Pangan, Krisis Energi, dan Resesi Global

Dampak perang Rusia-Ukraina berimbas pada melemahnya suplai pangan dan energi di seluruh dunia. Melemahnya suplai mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi memicu inflasi dan kenaikan harga produksi. Untuk meredam laju inflasi bank sentral berbagai negara menaikkan suku bunga acuan secara agresif, sehingga suku bunga kredit naik dan pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Resesi yang mengancam dunia merupakan dampak krisis pangan dan energi yang diikuti dengan kenaikan inflasi. Resesi akan mengganggu stabilitas ekonomi negara dan masyarakat sebagai individu. Resesi bisa mengganggu kesejahteraan sosial di tingkat masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan resesi sebagai kondisi ekonomi sebuah negara yang sedang memburuk. Resesi ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Resesi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, penurunan penerimaan negara, perusahaan rentan bangkrut karena pendapatan perusahaan juga menurun sehingga mengancam terjadinya PHK dan peningkatan pengangguran, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah berupaya untuk mendorong efisiensi pada sektor pangan dan energi, serta menjaga agar harga komoditas pangan dan energi di masyarakat bawah tetap stabil dan terjangkau. Kebijakan tersebut mampu mengendalikan inflasi sehingga ekonomi dapat tetap tumbuh.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global terutama disebabkan pemanasan global yang intensitasnya semakin tinggi, baik berupa kejadian cuaca dan iklim ekstrim maupun perubahan iklim dalam jangka panjang. Perubahan iklim membawa dampak yang luas pada banyak segi kehidupan manusia. Kenaikan suhu global ini diperkirakan mencapai puncak pada periode tahun 2030–2060. Kenaikan suhu global diatas 5 derajat memberi dampak yang fatal bagi kehidupan di bumi.

Proses pemanasan global berlangsung secara evolutif dengan dampak yang sudah dirasakan dari sekarang. Proses pemanasan global menyebabkan perubahan pola cuaca dan iklim yang ekstrim. Kondisi ini meningkatkan ancaman kekeringan di beberapa kawasan, dan sebaliknya risiko banjir dan tanah longsor meningkat di kawasan lainnya. Perubahan kondisi atmosfer dan cuaca yang ekstrim juga akan meningkatkan potensi ancaman badai dan angin kencang. Di samping itu penyakit endemik di wilayah tropis akan semakin sulit untuk dihapuskan (misalnya malaria dan demam berdarah). Potensi kemunculan kembali penyakit lama dan potensi jenis penyakit baru juga akan semakin tinggi pada seluruh kawasan, terutama di wilayah tropis.

Fenomena pencairan es di kutub juga menaikkan tinggi muka air laut dan menjadi ancaman bagi penduduk di kota-kota pesisir dan meningkatkan ancaman abrasi pantai. Meski dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi bahan pangan belum

dirasakan signifikan pada saat ini, potensi masalah tersebut perlu diantisipasi sejak dini.

3. Teknologi

Perkembangan teknologi akan mempercepat proses globalisasi dan pertukaran informasi antar negara. Teknologi juga meningkatkan mobilitas, produktivitas, serta usia harapan hidup seiring dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan dan rekayasa genetik. Perkembangan teknologi digital dan informasi akan semakin cepat seiring dengan perkembangan sektor jasa dan transaksi online. Teknologi digital juga menjadi faktor utama terjadinya revolusi di sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.

Perubahan teknologi yang berlangsung cepat berdampak langsung pada industri manufaktur. Revolusi industri mendorong transformasi ekonomi dunia secara cepat. Revolusi industri abad 18 (industri 1.0) mengawali proses mekanisasi industri. Berlanjut revolusi industri pada abad 19 (industri 2.0) seiring dengan penggunaan listrik dan division of labor yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan sistem mass production. Pertengahan abad 20 mengawali tahap revolusi industri (industri 3.0) melalui pengembangan mesin elektronik dan otomatisasi di bidang produksi. Hingga abad 21 ditandai dengan industri berbasis cyber yang dikelola secara virtual dan otomatisasi proses produksi (industri 4.0).

3.4.2.2 Isu Strategis Nasional

Pada tiap agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat isu strategis. Agenda pembangunan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, Isu strategisnya adalah:
 - Keberlanjutan Sumber Daya Alam (SDA).
Ketersediaan SDA yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang, karena peningkatan pemanfaatan SDA sebagai sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, sekaligus juga menjadi sumber devisa.
 - Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi.
Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan,

keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

- Transformasi struktural berjalan lambat
Transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, investasi rendah, dan peningkatan kualitas UMKM belum optimal.
- Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital
Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat.

2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan; (b) ketimpangan pendapatan pedesaan dan perkotaan; (c) konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing

- Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
- Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk
- Pemenuhan Layanan Dasar
- Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda
- Pengentasan kemiskinan
- Peningkatan Produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan Kebudayaan
 - Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
 - Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
 - Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
 - Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
 - Belum kukuhnya Moderasi Beragama untuk kerukunan umat beragama.
 - Belum optimalnya peran keluarga.
 - Rendahnya budaya literasi, Inovasi, dan Kreativitas
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau.
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
- Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.

Infrastruktur Ekonomi

- Konektivitas Jalan
- Konektivitas Darat

Infrastruktur perkotaan

- Transportasi Perkotaan
- Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan
- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

Energi dan Ketenagalistrikan

- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan akan dihadapkan pada upaya menyeimbangkan 3 (tiga) unsur yaitu: (i) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; (ii) akses serta keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; serta

(iii) kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan.

Transformasi Digital

- Penuntasan Infrastruktur TIK
 - Pemanfaatan Infrastruktur TIK
 - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, kelangkaan air dan penurunan kualitas air, serta berkurangnya luasan habitat ideal satwa langka yang terancam punah.
- Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyebabkan tingginya kerusakan lingkungan hidup. kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan, dan kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

- Tingginya risiko bencana di indonesia menurut *World Risk Report* (2016), disebabkan karena tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan/bahaya.
- Risiko bencana terkait karakteristik geologi wilayah indonesia yang terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona *megathrust*-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif.
- Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Hal ini dipengaruhi oleh variabilitas iklim ekstrim jangka pendek dan pengaruh perubahan iklim. Dalam jangka pendek, dapat dirasakan bahwa peristiwa iklim ekstrim semakin sering terjadi, sementara dalam

jangka panjang temperatur permukaan bumi akan mengalami peningkatan yang signifikan dari kondisi saat ini.

- Masih lemahnya tata kelola dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah. Penguatan kerjasama dan tata kelola bencana di daerah merupakan *mandatory* dari UU Nomor 23 Tahun 2014, yang berimplikasi kepada meningkatnya peran pemerintah daerah dalam urusan penanggulangan bencana. Dengan terbitnya PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang mengamanatkan pembenahan mekanisme kerjasama antar kelembagaan di daerah dalam upaya mewujudkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pasca bencana.

Pembangunan Rendah Karbon:

- Penurunan emisi dan intensitas Emisi GRK melalui Pembangunan Rendah Karbon memerlukan penguatan integrasi antara upaya penanganan perubahan iklim dengan program dan pencapaian target-target pembangunan.
 - Dukungan terhadap pembangunan rendah karbon lintas sektor dan multi pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
- Konsolidasi demokrasi, terdapat empat isu yang perlu diperhatikan: 1) kualitas representasi partai politik; 2) biaya politik tinggi yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3) masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi; 4) pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi.
 - Optimalisasi Kebijakan Luar, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan: 1) aspek keamanan seiring dengan semakin

mudahnya pergerakan warga antarnegara; 2) belum optimalnya penanganan pasar non tradisional yang sebagian besar negara Selatan-Selatan; 3) perlunya sinergi diplomasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan sosial budaya; 4) perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalam merespons perkembangan dinamika global.

- Penegakan Hukum Nasional berdasarkan indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013- 2018) menunjukkan penurunan. Dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi.
- Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Isu strategis terkait: 1) profesionalitas ASN; 2) dari aspek kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga pemerintah pusat; 3) banyaknya pengaduan terkait pelayanan publik; 4) dari sisi akuntabilitas menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dan praktik korupsi.
- Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
Isu terkait stabilitas keamanan nasional adalah 1) Dinamika Ancaman Pertahanan; 2) Dukungan Industri Pertahanan Belum Optimal; 3) Dinamika Ancaman Siber; 4) Indonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika; 5) Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan; 6) Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat; 7) Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut; 8) Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam.

Pentingnya menjaga stabilitas keamanan juga menjadi tantangan besar pada tahun 2024 terkait tahun politik di Indonesia. Pada tahun tersebut dilaksanakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di

seluruh Indonesia. Pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia tersebut berpotensi menimbulkan kondisi wilayah yang tidak kondusif sehingga dapat mengganggu kinerja pembangunan.

3.4.2.3 Isu Strategis Jawa Tengah

Rancangan RPD Provinsi Jawa Tengah merumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah sampai dengan triwulan III tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,36% (c to c), lebih baik dibandingkan triwulan III tahun 2021 yang sebesar 2,63% (c to c). Namun tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat *The Fed* dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada triwulan III tahun 2022 adalah Industri Pengolahan sebesar 33,94%, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,97%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,54%. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung dengan investasi, konsumsi masyarakat, ekspor dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar

5,57% menurun 0,38% poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95%. Pengaruh lainnya adalah pada Nilai Tukar Petani/NTP Jawa Tengah yang di bulan November 2022 sebesar 105,26 tertinggi di Pulau Jawa namun menurun 0,38% dibandingkan dengan bulan Oktober 2022 yang sebesar 105,66%.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah bagaimana mendorong upaya menuju pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kedepan.

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Selain itu, pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah sesuai dengan arah kebijakan 8 (delapan) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW.

2. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti megatrend global, era disrupsi, dan globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (*new normal*). Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat, yang digambarkan dari kondisi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah di tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, berpotensi memunculkan berbagai persoalan

pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor non-pemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), serta akses, mutu, relevansi serta partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia. Selain itu tantangan dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 59,12 di tahun 2020 menjadi 55,24 di tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukkan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun Indeks Pembangunan Gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 91,94 pada 2017 menjadi 92,48 pada 2021, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Selain itu, rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017 menjadi 8,97 pada

2021, serta angka pernikahan usia anak masih tinggi yaitu 13.595 perkawinan.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sumber daya alam juga semakin meningkat. Namun disisi lain sumber daya alam yang dimiliki potensinya semakin terbatas, serta daya dukung daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang di tahun 2021 sebesar 67,48, masuk dalam kategori sedang. Disisi lain, perubahan iklim juga sudah berdampak di Jawa Tengah sehingga diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim utamanya pada lokasi prioritas kerentanan ketahanan iklim. Selain tekanan lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk, Jawa Tengah juga menghadapi risiko bencana tingkat sedang hingga tinggi meskipun hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan tingkat risiko yang terus turun dari 157,73 pada tahun 2015 menjadi 125,73 pada tahun 2021.

4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya

proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

3.4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Banyumas

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis merupakan keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan melakukan penelaahan terhadap permasalahan daerah, isu global, isu nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, isu RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, kebijakan dan strategi RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031, dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dan SDGs, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka isu strategis RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja Kabupaten Banyumas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditunjukkan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang terus mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 71,12 kategori BB pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,08 pada tahun 2022.

Prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal

ini menunjukkan bahwa laporan keuangan kabupaten Banyumas telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain itu pemerintah Banyumas juga dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut juga menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas yang terus membaik, dengan transparansi anggaran melalui informasi APBD secara online yang dapat diakses oleh publik. Pencapaian ini harus terus dipertahankan agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyumas.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ditunjukkan dengan nilai SAKIP, dimana nilai Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah 76,47 dan meningkat menjadi 78,46 pada tahun 2022 dengan predikat BB. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik. Untuk mencapai predikat “**A**” masih dibutuhkan perbaikan terhadap 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik di Kabupaten Banyumas masih terkendala pada domain tata kelola dan manajemen SPBE. Perbaikan tata kelola dan manajemen SPBE antara lain diupayakan dengan penyusunan arsitektur SPBE, dan pelatihan manajemen risiko SPBE. Perbaikan ini akan dapat mendukung keterbukaan dan transparansi informasi serta pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah berbasis inovasi dan IT. Kabupaten Banyumas telah ditetapkan sebagai kabupaten dengan kategori informatif dengan nilai keterbukaan informasi publik 93,21%.

Untuk dapat bekerja secara efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, maka ASN sebagai aparatur pemerintahan semakin dituntut profesionalitasnya dengan terus meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja serta mampu mengimplementasikan *core value* **ASN BERAKHLAK** dalam meningkatkan pelayanan publik.

Peran stakeholders dalam pembangunan dalam hal ini perlu terus dikembangkan, karena pemerintah daerah dituntut untuk dapat bekerja semakin efektif dan memberikan ruang bagi kolaborasi antar pihak menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kabupaten Banyumas tahun 2022 ditunjukkan dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan nilai 3,225 dengan kategori tinggi. Capaian ini diharapkan dapat mendorong investasi daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penilaian IDSD sebagai penguat/*enabling* adalah penyediaan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Penyediaan infrastruktur diupayakan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan memberikan dukungan kegiatan ekonomi. Peningkatan jalan kabupaten, penyediaan air bersih dan air minum, permukiman perkotaan yang berkelanjutan didukung sistem transportasi yang menghubungkan wilayah diharapkan dapat menarik investasi di Kabupaten Banyumas.

Stabilitas keamanan wilayah melalui pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga diperlukan agar menciptakan wilayah yang kondusif bagi investasi. Komitmen bersama serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah perlu terus ditingkatkan, demikian juga pengendalian terhadap potensi konflik politik di masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pembentukan modal dan daya beli masyarakat. Selain juga pertumbuhan ekonomi daerah juga akan dapat membuka peluang pasar bagi investasi.

Untuk mendukung investasi, maka kepastian penggunaan lahan memerlukan rencana tata ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan perijinan. Kabupaten Banyumas sebagai kabupaten rawan bencana, maka RTRW harus berbasis risiko bencana. di samping itu diperlukan peningkatan mitigasi melalui perencanaan penanggulangan bencana yang terintegrasi serta pembangunan infrastruktur yang tanggap risiko bencana.

Keberadaan dan fungsi kelitbangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai fasilitasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan riset dan inovasi daerah. Pemanfaatan hasil riset dan pengembangan inovasi daerah diharapkan dapat menjadi faktor pendorong daya saing daerah.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas antara lain disebabkan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Banyumas terus dilakukan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada

tahun 2022 sebesar 73,17 menunjukkan peningkatan namun masih terdapat permasalahan pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, serta penurunan daya beli masyarakat.

Kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 sebesar 7,63 menjadi 7,78 pada tahun 2022, meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah dari 13,03 tahun pada tahun 2021 menjadi 13,21 tahun pada tahun 2022, namun masih perlu dioptimalkan karena kurangnya budaya baca masyarakat dan masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS). Kondisi tersebut memberi gambaran kualitas sumber daya manusia Kabupaten Banyumas dari aspek pendidikannya.

Komponen kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dimana AHH Kabupaten Banyumas tahun 2021 tercapai sebesar 73,80 meningkat menjadi 73,88 pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan namun masih lebih rendah dibanding dengan AHH Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar. Beberapa layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas belum optimal memenuhi kondisi yang ideal, diantaranya adalah jumlah/rasio dokter spesialis dan tenaga medis, rasio rumah sakit per satuan penduduk, serta rasio puskesmas per satuan penduduk. Adanya kasus kematian ibu, gizi buruk, dan stunting menjadi perhatian dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan sehingga generasi baru memiliki peluang kehidupan yang lebih baik.

Pengendalian pertumbuhan penduduk diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena merupakan bagian dari peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, serta peningkatan kapabilitas dan daya saing pemuda.

Belum tertangani Pengangguran secara optimal menyebabkan meningkatkan kemiskinan. Upaya pemulihan ekonomi daerah ternyata belum sepenuhnya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan kurangnya kesempatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas tahun 2021 dan 2022 stagnan sebesar 6,05. Tantangan pengurangan pengangguran adalah dengan meningkatkan penanaman modal atau investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diupayakan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk, agar mendukung pencapaian bonus

demografi pada tahun 2030, dimana penduduk Kabupaten Banyumas didominasi oleh penduduk usia produktif yang dipersiapkan sejak sekarang untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas, serta selanjutnya dapat diserap oleh dunia kerja. Tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja dan atau memperluas kesempatan berusaha, maka peluang bonus demografi tidak akan dapat dicapai bahkan akan dapat melahirkan kemiskinan baru.

4. Penguatan Ketahanan Pangan

Perang Rusia-Ukraina yang berakibat terhadap terhambatnya suplai bahan pangan serta menyebabkan kenaikan harga pangan merupakan pelajaran berharga akan pentingnya ketahanan pangan. Ketahanan Pangan di Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP kabupaten Banyumas mengalami penurunan nilai komposit pada tahun 2022 menjadi sebesar 79,02 dengan nilai ketersediaan pangan sebesar 80,98, nilai keterjangkauan pangan sebesar 79,48 dan nilai pemanfaatan pangan sebesar 77,20.

Belum optimal pemanfaatan pangan disebabkan masih kurangnya keamanan pangan dan belum idealnya pola konsumsi pangan masyarakat. Kurangnya keterjangkauan pangan disebabkan kurang meratanya distribusi pangan dan keterjangkauan harga pangan. Serta belum terpenuhi ketersediaan pangan secara mandiri di kabupaten Banyumas disebabkan belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan serta kurangnya produksi dan produktivitas komoditas pangan.

Kondisi geografis menyebabkan tidak semua bahan pangan dapat dipenuhi secara mandiri oleh suatu wilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi daerahnya dalam memproduksi bahan pangan.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, sehingga terus berupaya mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian terus diupayakan untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi faktor penting untuk peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sehingga memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan. Sedangkan untuk mendorong keterjangkauan pangan diupayakan melalui keterjangkauan harga pangan. Dengan didukung sistem produksi yang efisien maka harga bahan pangan hasil produksi pertanian pun diharapkan dapat bersaing dan dijangkau masyarakat.

3.4.2.5 Perumusan Isu-Isu Strategis DPU Kabupaten Banyumas

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Sumber lain bagi informasi atau isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 3 (tiga) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Tabel 3.4.a Kriteria dan Bobot dalam Penentuan Isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Masing-masing isu strategis perangkat daerah dihitung skornya menggunakan tabel berikut ini.

Tabel 3.4.b
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota	20	10	20	10	15	25	100
2	Jumlah wilayah terkoneksi jaringan jalan kondisi mantap	20	10	20	10	15	25	100
3	Kinerja pelayanan irigasi	20	10	20	10	15	25	100
4	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	20	10	20	10	15	20	95
5	Rasio lokasi jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor yang terlindungi turap	10	5	10	5	7,5	10	47,5
6	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	20	10	20	10	15	25	100
7	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	20	5	15	5	10	5	60
	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	18,57	8,57	17,86	8,57	13,21	19,29	90,42

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Banyumas.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Satuan	Capaian		Target			Target Akhir
		2021	2022	2024	2025	2026	
Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	%	76,41	78,232	79,782	80,601	81.419	82.13

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya layanan jaringan jalan
- Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana
- Meningkatnya Penataan kawasan Strategis
- Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi
- Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang urusan perangkat daerah

Tabel 4.3. Tabel Tujuan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Tahun		
			2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	79,782%	80,601%	81,419%

Tabel 4.3. Tabel Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun-		
			2024	2025	2026
-1	-3	-4	-5	-6	-9
1	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Persentase wilayah yang terhubung jaringan jalan kondisi mantap	98.187	98.489	98.792
		Tingkat kemantapan jalan kabupaten kota	84.167	85.626	87.085
2	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Kinerja pelayanan irigasi	82.820	83.820	84.820
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana	0.520	0.528	0.536
		Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	53.425	54.297	55.168
4	Meningkatnya Penataan kawasan Strategis	Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	83.043	83.106	83.169
5	Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	77.603	79.850	82.097

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 5.
Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan KSO SDA dan Irigasi 2. Penyedia jasa konstruksi sangat terbuka thdp pembinaan dari Pemerintah Daerah 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debit air berkurang 2. Kerusakkan Sumber Air 3. Rawan Bencana 4. Kurangnya pemeliharaan bangunan pemerintah oleh penggunanya 5. Pembinaan Jasa Konstruksi belum dianggap sebagai program yang penting. 6. Pengadaan / Pemeliharaan Sarpras kebinamargaan perlu anggaran yang tinggi.
<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. infrastruktur daerah prioritas dalam pembangunan Daerah. 2. Potensi dukungan anggaran dari Pusat (DAK dll) 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya • pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penyediaan dan pengolahan air baku • Pembangunan turap / talud / brojong • Pembangunan / Pemeliharaan Drainase • Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung • Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laju kerusakan Jalan tinggi 2. kapasitas dan kualitas jasa konstruksi Masih rendahnya 3. Sebagian besar Jalan kabupaten yang awalnya adalah jalan Desa tersebut masih sesuai standar jalan Desa. 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan Peningkatan Jalan • Pembinaan Jasa Konstruksi • Pembangunan dan Penggantian / Rehabilitasi Jembatan 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Bangunan pelengkap jalan • Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan • Melaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan • Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan

Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas adalah :

1. Mengembangkan jaringan jalan penghubung sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan / jembatan
2. Mengendalikan dan mengurangi potensi maupun resiko daya rusak air dan Meningkatkan kualitas Irigasi
3. Meningkatkan Kualitas infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan pendukungnya
4. Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Program yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan kebijaksanaan Operasional adalah :

- a. Program Penyelenggaraan jalan
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- d. Program Penataan Bangunan Gedung
- e. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten
2. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi
3. Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungan
4. Meningkatkan kualitas Penyedia Jasa Konstruksi
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalur evakuasi dan penguatan tebing rawan longsor

Tabel 5.2 Tabel Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya layanan jaringan jalan	Mengembangkan jaringan jalan penghubung sesuai fungsi jalan, meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan / jembatan	Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten
	Meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi	Mengendalikan dan mengurangi potensi maupun resiko daya rusak air dan Meningkatkan kualitas Irigasi	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalur evakuasi dan penguatan tebing rawan longsor
	Meningkatnya Penataan kawasan Strategis	Meningkatkan Kualitas infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan pendukungnya	Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung dan lingkungan
	Meningkatnya kualitas SDM sektor jasa konstruksi	Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi	Meningkatkan kualitas Penyedia Jasa Konstruksi

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dinas PU				123.436.960.161		126.289.965.284		126.981.384.428		376.708.309.873
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	19.571.180.973	100 %	20.023.530.738	100 %	20.973.482.420	100 %	60.568.194.131
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	271.182.855	4 Dokumen	277.450.723	4 Dokumen	290.613.471	4 Dokumen	839.247.049
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	174.229.284	3 Dokumen	178.256.259	3 Dokumen	186.713.046	3 Dokumen	539.198.589
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	96.953.571	1 Laporan	99.194.464	1 Laporan	103.900.425	1 Laporan	300.048.460
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	13.308.885.607	12 Dokumen	13.616.494.598	12 Dokumen	14.262.485.166	12 Dokumen	41.187.865.371
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	150 Orang /bulan	13.216.927.118	150 Orang /bulan	13.522.410.667	150 Orang /bulan	14.163.937.727	150 Orang /bulan	40.903.275.512
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	12 Dokumen	91.958.489	12 Dokumen	94.083.931	12 Dokumen	98.547.439	12 Dokumen	284.589.859
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan	0,00	12 Laporan	853.736.210	12 Laporan	873.468.661	12 Laporan	914.907.559	12 Laporan	2.642.112.430

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	10 Paket	16.629.701	10 Paket	17.014.065	10 Paket	17.821.242	10 Paket	51.465.008
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	10 Paket	90.136.552	10 Paket	92.219.883	10 Paket	96.594.958	10 Paket	278.951.393
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	100 Paket	27.442.303	10 Paket	28.076.578	10 Paket	29.408.581	10 Paket	84.927.462
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,00	10 Paket	307.676.510	10 Paket	314.787.854	10 Paket	329.721.946	10 Paket	952.186.310
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	50 Paket	65.688.163	50 Paket	67.206.417	50 Paket	70.394.808	50 Paket	203.289.388
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	300.000.000	50 Laporan	900.000.000
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	1 Dokumen	46.162.981	1 Dokumen	54.163.864	1 Dokumen	70.966.024	3 Dokumen	171.292.869
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1 Laporan	477.093.969	1 Laporan	488.121.067	1 Laporan	511.278.393	1 Laporan	1.476.493.429
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0,00	1 Unit	52.707.762	1 Unit	60.859.915	1 Unit	77.979.747	3 Unit	191.547.424
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,00	30 Unit	300.000.000	30 Unit	300.000.000	30 Unit	200.000.000	90 Unit	800.000.000
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	10 Unit	124.386.207	10 Unit	127.261.152	10 Unit	33.298.646	30 Unit	284.946.005
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	3.994.297.475	12 Laporan	4.086.617.887	12 Laporan	4.280.494.262	12 Laporan	12.361.409.624
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	12 Laporan	229.628.945	12 Laporan	234.936.371	12 Laporan	246.082.167	12 Laporan	710.647.483
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	12 Laporan	47.902.045	12 Laporan	49.009.207	12 Laporan	51.334.291	12 Laporan	148.245.543
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	12 Laporan	3.716.766.485	12 Laporan	3.802.672.309	12 Laporan	3.983.077.804	12 Laporan	11.502.516.598
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang	0,00	1 Laporan	665.984.857	1 Laporan	681.377.802	1 Laporan	713.703.569	1 Laporan	2.061.066.228

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0,00	37 Unit	341.261.151	37 Unit	349.148.738	37 Unit	365.712.971	37 Unit	1.056.122.860
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0,00	20 Unit	65.193.680	20 Unit	69.011.811	20 Unit	70.000.000	60 Unit	204.205.491
1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0,00	-	0	-	0	10 Unit	7.030.030	10 Unit	7.030.030
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	30 Unit	300.000.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	1 Unit	148.834.662	1 Unit	152.274.686	1 Unit	159.498.866	1 Unit	460.608.214
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	10 Unit	10.695.364	1 Unit	10.942.567	-	11.461.702	-	33.099.633
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase bangunan penampung air baku dalam kondisi baik	50 %	55,56 %	13.690.117.549	61,11 %	14.006.537.973	66,67 %	14.671.032.890	66,67 %	42.367.688.412
		Persentase jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	86,04 %	86,42 %	0	86,79 %	0	87,16 %	0	87,16 %	0
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Jumlah Bangunan Air Baku ditangani	0,00	1 Unit	11.634.259.023	1 Unit	11.903.624.540	1 Unit	12.469.302.362	3 Unit	36.007.185.925

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,00	2,9 Km	0	2,9 Km	0	2,9 Km	0	8,7 Km	0
1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,00	1 KM	1.500.000.000	1 KM	2.000.000.000	1 KM	2.500.000.000	1 KM	6.000.000.000
1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	300.000.000
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	5 KM	3.909.862.026	5 KM	4.011.787.405	5 KM	4.225.834.574	15 KM	12.147.484.005
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.664.396.997	1 Unit	5.591.837.135	1 Unit	5.443.467.788	3 Unit	16.699.701.920
1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	0,00	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0,00	1 Dokumen	460.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	860.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	77 %	76,81 %	2.055.858.526	77,07 %	2.102.913.433	77,33 %	2.201.730.528	77,33 %	6.360.502.487

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,00	3 KM	948.357.425	3 KM	970.276.861	3 KM	1.016.308.510	9 KM	2.934.942.796
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,00	2 KM	687.501.101	2 KM	712.636.572	2 KM	765.422.018	6 KM	2.165.559.691
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	2.024 DI	20 DI	20.000.000	20 DI	20.000.000	20 DI	20.000.000	60 DI	60.000.000
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	0,00	7 Lembaga	350.000.000	7 Lembaga	350.000.000	7 Lembaga	350.000.000	21 Lembaga	1.050.000.000
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0,00	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	74,77 %	76,1 %	1.758.254.666	76,76 %	1.798.893.301	77,43 %	1.884.235.979	77,43 %	5.441.383.946
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang dibangun ditingkatkan dan dipelihara	0,00	3 Km	1.758.254.666	3 Km	1.798.893.301	3 Km	1.884.235.979	9 Km	5.441.383.946
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	0,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	737.611.331	5 Sistem Drainase Perkotaan	754.659.781	5 Sistem Drainase Perkotaan	790.462.175	15 Sistem Drainase Perkotaan	2.282.733.287
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	657.210.717	5 Sistem Drainase Perkotaan	674.712.170	5 Sistem Drainase Perkotaan	711.465.884	15 Sistem Drainase Perkotaan	2.043.388.771
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	0,00	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	300.000.000
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	0,00	5 Sistem Drainase Perkotaan	263.432.618	5 Sistem Drainase Perkotaan	269.521.350	5 Sistem Drainase Perkotaan	282.307.920	15 Sistem Drainase Perkotaan	815.261.888
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	62 %	87,21 %	23.919.618.496	88,37 %	24.472.473.929	89,53 %	25.633.491.343	89,53 %	74.025.583.768
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	62 %	63,1 %	23.919.618.496	64,29 %	24.472.473.929	65,48 %	25.633.491.343	65,48 %	74.025.583.768
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	0,00	50 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000	50 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000	50 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000	150 Bangunan Gedung Cagar Budaya	300.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	0,00	5 Bangunan Gedung	100.000.000	5 Bangunan Gedung	100.000.000	5 Bangunan Gedung	100.000.000	5 Bangunan Gedung	300.000.000
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	0,00	10 Bangunan Gedung	1.527.845.961	10 Bangunan Gedung	1.563.159.147	-	1.637.318.180	-	4.728.323.288
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10 Dokumen	22.033.712.964	10 Dokumen	22.547.601.972	10 Dokumen	23.626.788.411	30 Dokumen	68.208.103.347
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	0,00	100 Dokumen	158.059.571	100 Dokumen	161.712.810	100 Dokumen	169.384.752	100 Dokumen	489.157.133

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase luas kawasan strategis yang tertata	82,98 %	82,98 %	2.476.266.610	82,98 %	2.533.500.694	82,98 %	2.653.694.444	82,98 %	7.663.461.748
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kawasan strategis yang tertata	67 %	66,67 %	2.476.266.610	66,67 %	2.533.500.694	100 %	2.653.694.444	100 %	7.663.461.748
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	0,00	3 Kawasan	2.376.266.610	3 Kawasan	2.433.500.694	3 Kawasan	2.553.694.444	3 Kawasan	7.363.461.748
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	300.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	58 %	59,25 %	61.968.835.343	60,08 %	63.401.124.379	60,91 %	61.108.985.768	60,91 %	186.478.945.490
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten dibangun ditingkatkan dan dipelihara	70 Km	133 Km	61.968.835.343	133 Km	63.401.124.379	133 Km	61.108.985.768	399 Km	186.478.945.490
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0,00	7 Dokumen	500.000.000	7 Dokumen	500.000.000	7 Dokumen	500.000.000	21 Dokumen	1.500.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0,00	1 Jembatan	500.000.000	1 Jembatan	500.000.000	1 Jembatan	500.000.000	3 Jembatan	1.500.000.000
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,00	0,1 KM	500.000.000	-	500.000.000	-	500.000.000	0,1 KM	1.500.000.000
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0,00	50 KM	42.309.575.148	50 KM	43.138.327.360	50 KM	40.198.746.090	50 KM	125.646.648.598
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,00	5 KM	5.479.398.456	5 KM	5.606.044.088	5 KM	5.872.004.727	15 KM	16.957.447.271
1.03.10.2.01.0035	Pembangunan Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	0,00	-	0	1 Flyover	100.000.000	-	0	1 Flyover	100.000.000
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0,00	50 KM	100.000.000	50 KM	100.000.000	50 KM	100.000.000	150 KM	300.000.000
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0,00	0,5 KM	200.000.000	0,5 KM	200.000.000	0,5 KM	200.000.000	1,5 KM	600.000.000
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0,00	5 Jembatan	410.954.884	5 Jembatan	420.453.307	5 Jembatan	440.400.355	15 Jembatan	1.271.808.546
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0,00	1 Jembatan	1.185.446.781	1 Jembatan	1.212.846.077	1 Jembatan	1.270.385.638	3 Jembatan	3.668.678.496
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0,00	1 Jembatan	200.000.000	1 Jembatan	200.000.000	1 Jembatan	200.000.000	3 Jembatan	600.000.000
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0,00	1.508 KM	600.000.000	1.508 KM	600.000.000	1.508 KM	600.000.000	4.524 KM	1.800.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0,00	75 KM	9.983.460.074	75 KM	10.223.453.547	75 KM	10.727.448.958	225 KM	30.934.362.579
1.03.10.2.01.0047	Pembangunan Underpass	Jumlah Underpass yang Dibangun	0,00	-	0	1 Underpass	100.000.000	-	0	1 Underpass	100.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jumlah SDM Jasa Konstruksi yang dibina	68,81 %	75,56 %	52.686.524	78,94 %	53.904.270	82,32 %	56.461.584	82,32 %	163.052.378
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	0,00	2 Kegiatan	52.686.524	2 Kegiatan	53.904.270	2 Kegiatan	56.461.584	6 Kegiatan	163.052.378
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0,00	30 Orang	5.000.000	30 Orang	5.000.000	30 Orang	5.000.000	90 Orang	15.000.000
1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya	0,00	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	15.000.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0,00	100 Orang	42.686.524	100 Orang	43.904.270	100 Orang	46.461.584	300 Orang	133.052.378
	UPTD LPBK		0,00		537.422.449		549.843.923		575.929.490		1.663.195.862
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	537.422.449	100 %	549.843.923	100 %	575.929.490	100 %	1.663.195.862
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	-	0	-	0	-	0	-	0

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	10 Laporan	134.543.060	10 Laporan	137.652.761	10 Laporan	144.183.251	10 Laporan	416.379.072
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	24 Paket	2.429.000	25 Paket	2.429.000	26 Paket	2.429.000	75 Paket	7.287.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	24 Paket	34.632.000	25 Paket	36.500.000	26 Paket	39.000.000	75 Paket	110.132.000
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	24 Paket	3.500.000	25 Paket	4.500.000	26 Paket	5.500.000	75 Paket	13.500.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,00	24 Paket	17.952.000	25 Paket	17.952.000	26 Paket	17.952.000	75 Paket	53.856.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	24 Paket	5.000.000	25 Paket	5.500.000	-	6.000.000	49 Paket	16.500.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	24 Laporan	71.030.060	25 Laporan	70.771.761	26 Laporan	73.302.251	75 Laporan	215.104.072
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10 Laporan	4.341.370	10 Laporan	4.441.712	10 Laporan	4.652.435	10 Laporan	13.435.517

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	1 Unit	4.341.370	1 Unit	4.441.712	1 Unit	4.652.435	3 Unit	13.435.517
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	117.037.975	12 Laporan	145.532.896	12 Laporan	149.932.308	12 Laporan	412.503.179
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	24 Laporan	35.507.694	25 Laporan	35.202.615	26 Laporan	37.202.027	75 Laporan	107.912.336
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1 Laporan	1	3 Laporan	3
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	24 Laporan	81.530.280	25 Laporan	110.330.280	26 Laporan	112.730.280	75 Laporan	304.590.840

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	1 Laporan	281.500.044	1 Laporan	262.216.554	1 Laporan	277.161.496	1 Laporan	820.878.094
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	24 Unit	256.500.044	25 Unit	237.216.554	26 Unit	252.161.496	75 Unit	745.878.094
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	24 Unit	25.000.000	25 Unit	25.000.000	26 Unit	25.000.000	75 Unit	75.000.000
	UPTD Purwokerto		0,00		133.774.464		136.866.401		143.359.584		414.000.449
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	133.774.464	100 %	136.866.401	100 %	143.359.584	100 %	414.000.449
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrai Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	5.057.906	12 Laporan	5.174.810	12 Laporan	5.420.312	12 Laporan	15.653.028
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.024 Dokumen	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	36 Dokumen	15.653.028
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	73.571.449	12 Laporan	75.271.911	12 Laporan	78.842.942	12 Laporan	227.686.302
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	369.965	2.025 Paket	378.518	2.026 Paket	396.472	6.075 Paket	1.144.955

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	22.014.419	2.025 Paket	22.523.239	2.026 Paket	23.591.782	6.075 Paket	68.129.440
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	2.272.897	2.025 Paket	2.325.430	2.026 Paket	2.435.753	6.075 Paket	7.034.080
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	44.067.008	2.025 Paket	45.085.531	2.026 Paket	47.224.469	6.075 Paket	136.377.008
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	1.685.969	2.025 Paket	1.724.937	2.026 Paket	1.806.771	6.075 Paket	5.217.677
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.023 Laporan	2.024 Laporan	3.161.191	2.025 Laporan	3.234.256	2.026 Laporan	3.387.695	6.075 Laporan	9.783.142
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	52.394.873	12 Laporan	53.605.877	12 Laporan	56.149.035	12 Laporan	162.149.785
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	13.157.406	2.025 Laporan	13.461.513	2.026 Laporan	14.100.151	6.075 Laporan	40.719.070
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	39.237.467	2.025 Laporan	40.144.364	2.026 Laporan	42.048.884	6.075 Laporan	121.430.715

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	1 Laporan	2.750.236	1 Laporan	2.813.803	1 Laporan	2.947.295	1 Laporan	8.511.334
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.023 Unit	2.024 Unit	2.223.371	2.025 Unit	2.274.760	2.026 Unit	2.382.679	6.075 Unit	6.880.810
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.023 Unit	2.024 Unit	526.865	2.025 Unit	539.043	2.026 Unit	564.616	6.075 Unit	1.630.524
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
	UPTD Sokaraja		0,00		136.017.392		139.161.170		145.763.221		420.941.783
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	136.017.392	100 %	139.161.170	100 %	145.763.221	100 %	420.941.783
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.100.000	12 Dokumen	5.500.000	12 Dokumen	15.400.000
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	2 Dokumen	5.100.000	2 Dokumen	5.500.000	6 Dokumen	15.400.000

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Tugas ASN										
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	56.935.926	12 Laporan	55.083.978	12 Laporan	57.613.221	12 Laporan	169.633.125
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	850.000	1 Paket	900.000	1 Paket	950.000	3 Paket	2.700.000
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	23.715.926	10 Paket	24.000.000	10 Paket	25.500.000	30 Paket	73.215.926
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	1.700.000	10 Paket	1.850.000	10 Paket	1.900.000	30 Paket	5.450.000
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.870.000	12 Paket	24.500.000	12 Paket	25.000.000	36 Paket	73.370.000
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.000 Paket	3.000 Paket	1.800.000	3.000 Paket	1.850.000	3.000 Paket	1.900.000	9.000 Paket	5.550.000
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	5.000.000	50 Laporan	1.983.978	50 Laporan	2.363.221	150 Laporan	9.347.199
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	69.631.466	12 Laporan	73.877.192	12 Laporan	77.000.000	12 Laporan	220.508.658

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.023 Laporan	12 Laporan	10.631.466	12 Laporan	10.877.192	12 Laporan	11.000.000	36 Laporan	32.508.658
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	59.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	66.000.000	36 Laporan	188.000.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	1 Laporan	4.650.000	1 Laporan	5.100.000	1 Laporan	5.650.000	1 Laporan	15.400.000
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	3.450.000	10 Unit	3.600.000	10 Unit	3.900.000	30 Unit	10.950.000
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.500.000	1 Unit	1.750.000	1 Unit	4.450.000
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UPTD Banyumas		0,00		108.164.514		110.664.527		115.914.647		334.743.688
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	108.164.514	100 %	110.664.527	100 %	115.914.647	100 %	334.743.688
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	6.954.621	12 Dokumen	7.115.364	12 Dokumen	7.452.929	12 Dokumen	21.522.914
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	12 Dokumen	6.954.621	12 Dokumen	7.115.364	12 Dokumen	7.452.929	12 Dokumen	21.522.914
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	59.240.727	12 Laporan	60.609.962	12 Laporan	63.485.405	12 Laporan	183.336.094
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,00	3 Paket	930.445	3 Paket	951.949	3 Paket	997.112	3 Paket	2.879.506
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	7 Paket	20.452.908	7 Paket	20.925.638	7 Paket	21.918.387	7 Paket	63.296.933
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0,00	9 Paket	5.929.868	9 Paket	6.066.926	9 Paket	6.354.751	9 Paket	18.351.545
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,00	9 Paket	22.552.466	9 Paket	23.073.723	9 Paket	24.168.381	9 Paket	69.794.570
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0,00	10 Paket	1.946.240	10 Paket	1.991.224	10 Paket	2.085.691	10 Paket	6.023.155

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	30 Laporan	7.428.800	30 Laporan	7.600.502	30 Laporan	7.961.083	30 Laporan	22.990.385
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	36.073.557	12 Laporan	36.907.326	12 Laporan	38.658.275	12 Laporan	111.639.158
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0,00	12 Laporan	8.220.679	12 Laporan	8.410.683	12 Laporan	8.809.701	12 Laporan	25.441.063
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0,00	12 Laporan	27.852.878	12 Laporan	28.496.643	12 Laporan	29.848.574	12 Laporan	86.198.095
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	0,00	9 Laporan	5.895.609	9 Laporan	6.031.875	9 Laporan	6.318.038	9 Laporan	18.245.522

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		urusan pemerintahan daerah									
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0,00	9 Unit	5.895.609	9 Unit	6.031.875	9 Unit	6.318.038	9 Unit	18.245.522
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
	UPTD Sumpiuh		0,00		136.017.392		139.161.169		145.763.222		420.941.783
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	136.017.392	100 %	139.161.169	100 %	145.763.222	100 %	420.941.783
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	12 Dokumen	15.653.028
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	12 Dokumen	15.653.028

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	62.753.732	12 Laporan	64.204.163	12 Laporan	67.250.124	12 Laporan	194.208.019
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	510.006	12 Paket	521.793	12 Paket	546.548	12 Paket	1.578.347
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.603.700	12 Paket	9.825.670	12 Paket	10.291.818	12 Paket	29.721.188
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.504.727	12 Paket	1.539.506	12 Paket	1.612.543	12 Paket	4.656.776
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.176.557	12 Paket	49.290.065	12 Paket	51.628.472	12 Paket	149.095.094
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.905.012	12 Paket	1.949.044	12 Paket	2.041.511	12 Paket	5.895.567
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.053.730	12 Laporan	1.078.085	12 Laporan	1.129.232	12 Laporan	3.261.047
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	64.944.339	12 Laporan	66.445.400	12 Laporan	69.597.687	12 Laporan	200.987.426

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.598.441	12 Laporan	8.797.177	12 Laporan	9.214.530	12 Laporan	26.610.148
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	56.345.898	12 Laporan	57.648.223	12 Laporan	60.383.157	12 Laporan	174.377.278
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	1 Laporan	3.261.415	1 Laporan	3.336.796	1 Laporan	3.495.099	1 Laporan	10.093.310
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	2.107.461	12 Unit	2.156.171	12 Unit	2.258.463	12 Unit	6.522.095
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	1.153.954	12 Unit	1.180.625	12 Unit	1.236.636	12 Unit	3.571.215
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UPTD Cilongok		0,00		141.549.477		144.821.118		151.691.688		438.062.283
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	141.549.477	100 %	144.821.118	100 %	151.691.688	100 %	438.062.283
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	12 Dokumen	15.653.028
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023 Dokumen	2.024 Dokumen	5.057.906	2.025 Dokumen	5.174.810	2.026 Dokumen	5.420.312	6.075 Dokumen	15.653.028
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	66.378.547	12 Laporan	67.912.756	12 Laporan	71.134.658	12 Laporan	205.425.961
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	688.087	2.025 Paket	703.987	2.026 Paket	737.387	6.075 Paket	2.129.461
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	16.834.563	2.025 Paket	17.223.662	2.026 Paket	18.040.783	6.075 Paket	52.099.008
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	2.129.062	2.025 Paket	2.178.272	2.026 Paket	2.281.613	6.075 Paket	6.588.947
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	36.546.534	2.025 Paket	37.391.236	2.026 Paket	39.165.142	6.075 Paket	113.102.912
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	1.708.308	2.025 Paket	1.747.792	2.026 Paket	1.830.710	6.075 Paket	5.286.810

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.023 Laporan	2.024 Laporan	8.471.993	2.025 Laporan	8.667.807	2.026 Laporan	9.079.023	6.075 Laporan	26.218.823
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	67.036.131	12 Laporan	68.585.542	12 Laporan	71.839.361	12 Laporan	207.461.034
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	11.330.375	2.025 Laporan	11.592.255	2.026 Laporan	12.142.212	6.075 Laporan	35.064.842
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	55.705.756	2.025 Laporan	56.993.287	2.026 Laporan	59.697.149	6.075 Laporan	172.396.192
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	1 Laporan	3.076.893	1 Laporan	3.148.010	1 Laporan	3.297.357	1 Laporan	9.522.260
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.023 Unit	2.024 Unit	2.550.028	2.025 Unit	2.608.967	2.026 Unit	2.732.741	6.075 Unit	7.891.736
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.023 Unit	2.024 Unit	526.865	2.025 Unit	539.043	2.026 Unit	564.616	6.075 Unit	1.630.524
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
	UPTD Ajibarang		0,00		80.311.637		82.167.882		86.066.073		248.545.592
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	80.311.637	100 %	82.167.882	100 %	86.066.073	100 %	248.545.592
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	3.688.057	12 Dokumen	3.773.299	12 Dokumen	3.952.311	12 Dokumen	11.413.667
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023 Dokumen	2.024 Dokumen	3.688.057	2.025 Dokumen	3.773.299	2.026 Dokumen	3.952.311	2.026 Dokumen	11.413.667
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	54.013.753	12 Laporan	55.100.384	12 Laporan	57.382.352	12 Laporan	166.496.489
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	350.892	2.025 Paket	359.002	2.026 Paket	376.034	6.075 Paket	1.085.928
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	14.251.376	2.025 Paket	14.580.769	2.026 Paket	15.272.506	6.075 Paket	44.104.651

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	1.302.938	2.025 Paket	1.333.053	2.026 Paket	1.396.295	6.075 Paket	4.032.286
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	27.788.980	2.025 Paket	28.431.268	2.026 Paket	29.780.098	2.026 Paket	86.000.346
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.023 Paket	2.024 Paket	3.003.448	2.025 Paket	3.072.866	2.026 Paket	3.218.649	6.075 Paket	9.294.963
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.023 Laporan	2.024 Laporan	7.316.119	2.025 Laporan	7.323.426	2.026 Laporan	7.338.770	6.075 Laporan	21.978.315
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	12 Laporan	18.163.084	12 Laporan	18.744.679	12 Laporan	19.966.052	12 Laporan	56.873.815
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	11.886.080	2.025 Laporan	12.160.803	2.025 Laporan	12.737.733	6.074 Laporan	36.784.616
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.023 Laporan	2.024 Laporan	6.277.004	2.025 Laporan	6.583.876	12 Laporan	7.228.319	12 Laporan	20.089.199
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	0,00	1 Laporan	4.446.743	1 Laporan	4.549.520	1 Laporan	4.765.358	1 Laporan	13.761.621

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Urusan Pemerintah Daerah									
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.023 Unit	2.024 Unit	4.446.743	2.025 Unit	4.549.520	2.026 Unit	4.765.358	6.075 Unit	13.761.621
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
	UPTD Jatilawang		0,00		108.164.514		110.664.526		115.914.647		334.743.687
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata rata Persentase capaian kinerja kegiatan penunjang perangkat daerah	0,00	100 %	108.164.514	100 %	110.664.526	100 %	115.914.647	100 %	334.743.687
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	12 Dokumen	15.653.028
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	5.057.906	12 Dokumen	5.174.810	12 Dokumen	5.420.312	12 Dokumen	15.653.028

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	12 Laporan	64.170.596	12 Laporan	65.653.774	12 Laporan	68.768.505	12 Laporan	198.592.875
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	511.230	1 Paket	523.045	1 Paket	547.861	1 Paket	1.582.136
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.680.462	1 Paket	19.112.225	1 Paket	20.018.942	1 Paket	57.811.629
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.888.303	1 Paket	2.955.060	1 Paket	3.095.253	1 Paket	8.938.616
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.039.026	12 Paket	23.571.529	12 Paket	24.689.804	12 Paket	71.300.359
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	980.097	1 Paket	1.002.750	1 Paket	1.050.322	1 Paket	3.033.169
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.071.478	12 Laporan	18.489.165	12 Laporan	19.366.323	12 Laporan	55.926.966
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	12 Laporan	35.691.158	12 Laporan	36.516.089	12 Laporan	38.248.477	12 Laporan	110.455.724
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.701.716	12 Laporan	7.879.726	12 Laporan	8.253.554	12 Laporan	23.834.996

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp
				target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.989.442	12 Laporan	28.636.363	12 Laporan	29.994.923	12 Laporan	86.620.728
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	12 Laporan	3.244.854	12 Laporan	3.319.853	12 Laporan	3.477.353	12 Laporan	10.042.060
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	3.076.893	1 Unit	3.148.009	1 Unit	3.297.357	1 Unit	9.522.259
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	167.961	1 Unit	171.844	1 Unit	179.996	1 Unit	519.801
1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0
	JUMLAH DPU				124.818.382.000		127.703.316.000		128.461.787.000		380.983.485.000

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 Sandingan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten	Satuan	Target Kinerja			Target Akhir
		2024	2025	2026	
Kinerja infrastruktur PUPR di Dinas PU	%	79.782	80.601	81.419	81.419
Kinerja pelayanan irigasi	%	82,820	83,820	84,820	84,820
Rasio lokasi rawan longsor yang terlindungi turap	%	53,425	54,297	55,168	55,168
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	84,167	85,626	87,085	87,085
Persentase wilayah terhubung jaringan jalan kondisi Mantap	%	98,187	98,489	98,792	98,792
Rasio jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana		0,520	0,528	0,536	0,536
Persentase SDM jasa konstruksi tersertifikasi	%	77,603	79,850	82,097	82,097
Persentase peningkatan kawasan strategis yang tertata	%	82,980	82,982	82,983	82,983

VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang kami susun. Selanjutnya akan dipedomani dan digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen lainnya, yaitu seperti :

- a. Dokumen Rencana Kerja setiap tahun yaitu untuk tahun 2024 sampai 2026.
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD).

Rencana Strategis juga berguna untuk bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Setiap unsur pada Dinas Pekerjaan Umum agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan pada Renstra.
2. Seluruh ASN di Dinas Pekerjaan Umum dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sehingga akan selalu terjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kami mengharapkan dengan penyusunan Rencana Strategis ini kiranya dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan baik, dapat melayani masyarakat dengan memuaskan serta dipertanggung jawabkan.

Terima kasih.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal Mei 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST., MSi.
NIP. 19671229 199002 1 002